



# UPAYA DIKMASLANTAS OLEH UNITDIKYASA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Reno Chandra Wibowo  
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang  
Email: reno\_wibowo@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang. Pelanggaran lalu lintas pelajar disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dan etika dalam berkendara yang baik dan benar. Upaya yang dilakukan guna mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar difokuskan kepada upaya pre-emptif. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran pelajar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelanggaran lalu lintas pelajar, upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Dikmaslantas. Penelitian ini dibahas dengan menggunakan konsep dan teori sebagai pisau analisis, yaitu menggunakan konsep upaya, konsep Dikmaslantas, konsep pelanggaran lalu lintas, konsep strategi belajar mengajar, teori penegakkan hukum, teori manajemen, dan teori komunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian *field research*, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas pelajar tinggi. Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar yang dianalisis dengan menggunakan teori manajemen adalah menjadi pembina upacara, melaksanakan kegiatan penyuluhan, *safety riding*, dan himbauan melalui srikandi zebra masih belum optimal karena masih tingginya pelanggaran lalu lintas pelajar. Kemampuan personel Unitdikyasa ditinjau dari konsep strategi belajar mengajar dan teori komunikasi belum optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia, anggaran, waktu dan tempat, perhatian dan dukungan pelajar maupun sekolah, peraturan tentang Dikmaslantas, sedangkan faktor pendukung adalah kerjasama lintas

sektoral. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya sudah dilaksanakan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar. Penulis menyarankan dilakukan penambahan jumlah personel dan pemberian pendidikan kejuruan (Dikjur), penambahan jumlah anggaran agar dapat menunjang pelaksanaan Dikmaslantas, penambahan Sarpras, perlunya inovasi-inovasi dalam kegiatan Dikmaslantas untuk mendorong kepatuhan pelajar terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

**Kata Kunci:** Dikmaslantas, Pelanggaran lalu lintas, dan Unitdikyasa

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia memiliki beragam budaya, suku, ras, agama, dan bahasa yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana dikemukakan Rustanto (2015:29), sebagai berikut:

Tiap suku bangsa ini memiliki ciri fisik, bahasa, kesenian, adat istiadat, yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Beberapa aspek keberagaman budaya Indonesia antara lain suku, bahasa, agama dan kepercayaan, serta kesenian.

Seiring perkembangan zaman, budaya mengalami perubahan. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan budaya adalah terjadinya proses akulturasi, dimana terdapat pengaruh kebudayaan dari luar bangsa Indonesia yang masuk dan berkembang di dalam negara Indonesia ini. Budaya luar khususnya budaya barat banyak berpengaruh kepada masyarakat Indonesia. Namun, budaya tersebut tidak berlaku secara umum, melainkan hanya sebagian dari masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ihromi (2013:32), sebagai berikut:

Walaupun benar bahwa unsur-unsur dari suatu kebudayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu, kita harus mengingat, bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis, ia selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu, pasti akan berubah dengan berlalunya waktu. Dalam setiap kebudayaan selalu ada suatu kebebasan tertentu pada para individu dan kebebasan individu memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku dan variasi itu yang pada akhirnya dapat menjadi milik bersama, dan dengan demikian di kemudian hari menjadi bagian dari kebudayaan. Atau mungkin beberapa aspek dari lingkungan akan berubah, dan memerlukan adaptasi kebudayaan yang baru.

Berubahnya kebudayaan suatu bangsa, merupakan dampak dari terjadinya perubahan peradaban bangsa tersebut. Perubahan budaya juga terjadi dalam bidang transportasi, dimana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain

yang dahulu ditempuh dengan jalan kaki yang memerlukan waktu tempuh relatif lama, namun sekarang sudah menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu tempuh yang relatif singkat. Efisiensi waktu dan tenaga mendorong seluruh masyarakat dalam beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah maupun teknologinya. Hal tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, diantaranya: kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal berkendara, masih terdapat banyak masyarakat yang belum paham tentang tata cara berkendara yang baik dan benar. Masyarakat tersebut hanya dapat mengendarai kendaraan saja, tetapi tidak paham akan tata cara berkendara yang baik dan benar. Hal tersebut merupakan pencetus utama terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Indonesia semakin memprihatinkan dan salah satu dampak dari pelanggaran tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Dari tahun ke tahun, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka-luka jumlahnya tidak sedikit, serta cenderung tidak menunjukkan penurunan angka kecelakaan yang signifikan. Banyak masyarakat yang menganggap keselamatan menjadi hal penting bagi dirinya dan orang lain, namun disisi lain banyak juga perilaku masyarakat masih acuh atau tidak peduli akan hal tersebut. Belum lagi toleransi dalam berkendara kepada sesama mulai memudar. Hal tersebut ditandai dengan masih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum pada setiap pengguna jalan untuk keamanan bersama.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data intel dasar Polres Magelang, jumlah penduduk pada tahun 2016 berjumlah 1.233.695 jiwa, luas wilayah Kabupaten Magelang 1085,63 km<sup>2</sup>. Kabupaten Magelang memiliki beragam wisata, seperti: Candi Borobudur, wisata arung jeram citra elo, museum seni rupa Hadi Widayat, dll. Kabupaten Magelang tersebut merupakan salah satu kabupaten yang padat dalam segi lalu lintas. Selain terdapat beragam pariwisata, Kabupaten Magelang juga merupakan perlintasan jalur dari arah utara ke arah selatan Provinsi Jawa Tengah, ataupun sebaliknya. Hal tersebut menjadikan arus lalu lintas di Kabupaten Magelang padat. Dengan padatnya lalu lintas tersebut, maka besar kemungkinan dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam hal lalu lintas.

Fakta yang terjadi dalam berlalu lintas adalah masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat sangat besar dapat menimbulkan suatu permasalahan lainnya, seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggar lalu lintas itu sendiri terdiri dari berbagai macam profesi. Berikut adalah data pelanggar lalu lintas periode 2014 sampai 2016 ditinjau dari profesi pelanggar.

Tabel 1.1

Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau dari Profesi

NO	PROFESI	2014	2015	2016	JUMLAH
----	---------	------	------	------	--------

01	02	03	04	05	06
1	PEGAWAI NEGERI	168	25	374	567
2	KARYAWAN SWASTA	20.923	16.445	13.021	50.389
3	PELAJAR	3.555	4.858	4.774	13.187
4	MAHASISWA	1.994	5.015	6.171	13.180
5	PENGEMUDI BIASA	1.013	1.684	2.847	5.544
6	PENGEMUDI UMUM	932	1.311	1.726	3.969
7	TNI	0	0	0	0
8	POLRI	0	0	0	0
9	LAIN-LAIN	76	345	0	421
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan data Satlantas Polres Magelang tiga tahun terakhir, jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang terdapat 87.347 pelanggaran. Angka tersebut tergolong cukup banyak. Karyawan swasta merupakan pelanggar lalu lintas paling tinggi dengan jumlah sebanyak 50.389. Kedua adalah pelajar dengan jumlah sebanyak 13.187 pelanggar. Urutan ketiga adalah mahasiswa dengan jumlah 13.180 pelanggar. Nomor empat adalah pengemudi biasa dengan jumlah pelanggar mencapai 5.544 pelanggar. Urutan kelima adalah pengemudi umum dengan jumlah sebanyak 3.969 pelanggar. Keenam terdapat pegawai negeri dengan jumlah 567 pelanggar. Dan yang terakhir lain-lain dengan jumlah 421 pelanggar. Pelanggaran tersebut bukan hanya sekedar pelanggaran biasa, beberapa pelanggaran tersebut diantaranya berakibat pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2  
Data Laka Lintas di wilayah Kabupaten Magelang

NO	AKIBAT LAKALANTAS	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	JUMLAH LAKA LANTAS	525	538	661
2	LUKA RINGAN (LR)	816	765	888
3	LUKA BERAT (LB)	4	6	2
4	MENINGGAL DUNIA	93	107	133
	KERUGIAN MATERIIL	Rp.344.340.000	Rp.298.000.000	Rp.487.150.000
	JUMLAH PELANGGARAN	22.243	25.983	25.200

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Tingkat kesadaran masyarakat terutama pelajar dalam berlalu lintas di Kabupaten Magelang masih sangat rendah, terbukti dengan tingkat pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi. Pelanggaran yang sering terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah tidak memakai helm, melanggar APILL (Alat Pembantu Isyarat Lalu Lintas), tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan menggunakan kendaraan melebihi muatan sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut dianggap telah membudaya

dikalangan masyarakat termasuk pelajar. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak sedikit juga pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Sebagaimana dikemukakan Sadono (2016:63), bahwa “banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat, yang pelanggarannya dalam berlalu-lintas kerap terjadi.”

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar merupakan pelanggaran yang mencerminkan kepatuhan generasi muda dalam menaati peraturan yang berlaku, dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila pelajar tidak dibekali pemahaman tentang lalu lintas sejak dini, maka pada saat dewasa nanti juga akan berlaku serupa, yaitu melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara tertib berlalu lintas. Pelajar merupakan tunas muda, yang pada saat nanti kelak akan meneruskan pembangunan bangsa Indonesia. Mereka yang nantinya akan mewarnai bangsa Indonesia melalui karya-karya mereka. Salah satu wujud pelajar merupakan penerus bangsa, mereka yang nantinya akan bekerja untuk bangsa ini. Salah satu pekerjaan yang ada adalah menjadi karyawan swasta. Hal tersebut apabila dikaitkan kembali dengan data diatas, bahwa karyawan swasta yang memiliki angka paling tinggi jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Magelang. Hal tersebut salah satunya merupakan dampak bahwa pada saat remaja dahulu, tidak dibekali pendidikan yang cukup tentang berlalu lintas. Akibat yang ditimbulkan adalah mereka melanggar peraturan dan tata tertib berlalu lintas. Harapannya adalah pelajar sebagai tunas bangsa agar memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas, karena lalu lintas sendiri adalah salah satu aspek manusia dalam beraktifitas. Upaya pencegahan perlu dikedepankan dalam usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Tindakan penanaman pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas, dilaksanakan melalui pemberian pesan persuasi Dikmaslantas yang diberikan oleh petugas kepada kelompok usia yang potensial. Apabila senantiasa dilaksanakan secara berkesinambungan, maka dapat membentuk pola pikir patuh hukum dan tertib berlalu lintas.

Hal tersebut diperkuat dari berita yang disiarkan oleh salah satu media massa, bahwa dalam penyelenggaraan operasi simpatik 2016 di Polres Magelang terjaring 1827 pelanggar seperti yang telah di kutip sebagai berikut:

Selama operasi simpatik 2016, ada ribuan pelanggar yang berhasil dijaring baik yang berada di DTL jalan Pemuda Muntilan dan Jalan Soekarno-Hatta, maupun di luar DTL. Yang berada di DTL semuanya ada 365 pelanggar yang terpaksa di tilang karena tidak membawa kelengkapan berkendara. Kemudian sebanyak 728 kena teguran, dan 377 pelanggaran tertulis, serta 357 berupa teguran lisan, mayoritas pelanggar adalah kalangan pelajar. (Kabar Magelang, 21 Maret 2016, URL)

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki tujuan yang tertuang dalam pasal empat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tujuan Polri tersebut tentu terdapat fungsi teknis sebagai pelaksana operasional Polri itu sendiri. Polri memiliki pengemban fungsi teknis kepolisian, diantaranya: Reserse, Lantas, Intel, Sabhara, dan Binmas. Fungsi-fungsi terkait tersebut memiliki keterkaitan untuk mewujudkan tujuan Polri yang tertuang dalam pasal empat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Korps lalu lintas Polri yang selanjutnya disingkat Korlantas Polri, merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, serta patroli jalan raya. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2012: pasal 1). Salah satu tugas Korlantas Polri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 12 huruf (g) ialah tentang pendidikan berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas dirasa sangat penting bagi masyarakat guna memberikan suatu upaya pre-emptif dengan cara memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam hal ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara. Implementasi dari tugas pendidikan masyarakat untuk menjamin keselamatan berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 203 ayat 2 tentang rencana program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Korlantas Polri merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Djamin (2011:128), sebagai berikut:

Sabhara, juga Polantas, merupakan tulang punggung kepolisian. Mereka yang pertama-tama menjadi cermin polisi suatu negara, karena merekalah pelaksana tugas pokok dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, serta menjaga keteraturan sosial (social order). Merekalah yang selalu bersentuhan dengan masyarakat di tingkat pospol, polsek, dan polres.

Pendidikan tentang lalu lintas ini dilaksanakan pada tingkat daerah, resort, dan sektor. Dalam (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2010: pasal 59), menjelaskan bahwa "Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan turjawali, pendidikan masyarakat lalu lintas

(Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas penegakan hukum di bidang lalu lintas". Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tugas satuan lalu lintas salah satunya pendidikan masyarakat lalu lintas. Pengertian pendidikan masyarakat lalu lintas adalah bentuk kegiatan penerangan kepada masyarakat yang diharapkan dapat menyentuh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat baik terorganisir maupun non organisir, sebagaimana dikutip dalam Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat "SOP" tentang pelaksanaan Unitdikyasa satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Magelang.

Dengan kondisi demikian, Satlantas Polres Magelang harus berperan aktif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang. Pencegahan dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif Dikmaslantas terhadap masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir. Seperti contohnya, petugas Satlantas Polres Magelang dikerahkan ke dalam titik-titik rawan terjadinya pelanggaran, selain itu mengunjungi sekolah, kampus, atau instansi lain dengan cara melakukan penyuluhan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Hal tersebut merupakan contoh langkah-langkah pre-emptif yang dapat dilakukan petugas Satlantas Polres Magelang dalam Mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.

Pencegahan terjadinya sikap melanggar lalu lintas di jalan raya dengan mengubah sikap-sikap melanggar yang ada dalam diri masyarakat, merupakan upaya yang diharapkan dapat menciptakan jalan raya jauh dari kerawanan perilaku melanggar yang dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Sebagaimana dikemukakan oleh Djamin (2011:132), sebagai berikut:

Agar masyarakat pemakai jalan sadar, taat hukum, dan berdisiplin membuat *traffic education and information* penting sekali. Dulu digalakkan Binmas Lantas di sekolah-sekolah. Murid-murid diikutsertakan dalam penegakkan disiplin berlalu lintas. Di jalan raya terdapat peringatan kecelakaan lalu lintas dengan memaparkan angka kecelakaan dan kematian yang melebihi korban perang vietnam.

Sehingga dengan terciptanya kondisi jalan raya yang kondusif tersebut, diharapkan dapat menciptakan jalan raya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk menunjang produktivitas masyarakat di segala bidang. Maka pada skripsi ini peneliti tertarik mengambil judul "Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar di Wilayah Hukum Polres Magelang".

## 1.2 Perumusan Permasalahan

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar merupakan pelanggaran yang mencerminkan kepatuhan generasi muda dalam menaati peraturan yang berlaku dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahannya. Upaya pencegahan menjadi prioritas utama guna menghindari permasalahan yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas pelajar. Pencegahan yang dilakukan dapat berupa upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang. Fokus

permasalahan yang akan diteliti ini adalah pada upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas pelajar, dengan rumusan permasalahan yang dimaksud adalah “Bagaimana upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar?”

Adapun pokok-pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan gambaran pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang.
2. Mendeskripsikan upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai upaya tersebut.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar yang difokuskan pada Unitdikyasa Satlantas, yaitu dapat memberikan manfaat baik praktis maupun akademis.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan maupun pemerintah guna menentukan kebijakan selanjutnya terkait Dikmaslantas. Serta dapat menjadi kajian dan evaluasi bagi Polri khususnya Satlantas dalam menetapkan cara dan teknik pencegahan yang tepat dan komprehensif terhadap pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi-instansi yang bersinergi dengan Polri dalam bidang ini guna mengambil kebijakan terpadu dan sinergis untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Selain memberi manfaat praktis sebagaimana telah disebutkan di atas, besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat akademis terkait upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademis, khususnya dalam pengembangan bidang ilmu Kepolisian

- mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui Dikmaslantas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan referensi terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan kumpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana hal tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi pustaka untuk mengetahui kepustakaan penelitian dan hasil temuan yang berkaitan dengan permasalahan tentang “Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar di Wilayah Hukum Polres Magelang”. Sebagai langkah untuk memperkuat studi ini, maka peneliti mempergunakan hasil penelitian terdahulu, khususnya yang terkait dengan penelitian untuk bahan acuan sebagai bahan perbandingan. Adapun kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 2.1.1 Penelitian yang telah dilakukan oleh Ferdiansyah (2013) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 60 dengan judul skripsi “Peran Satlantas Dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang”

Dalam penelitian Ferdiansyah dijelaskan bahwa para pengguna jalan di Indonesia yang belum tertib dalam berlalu lintas tersebut, dapat berakibat fatal kepada keselamatan pengguna jalan lainnya dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi pelanggaran lalu di Polres Kota Tangerang, faktor-faktor yang mempengaruhi anggota Satlantas dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas, dan peran anggota Satlantas dalam melakukan tindakan menekan tingkat pelanggaran lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah memiliki kesimpulan, yaitu: Situasi dan kondisi arus lalu lintas yang terdapat di wilayah hukum Polresta Tangerang cukup padat. Kondisi lalu lintas yang seperti ini menyebabkan banyak pengendara kendaraan bermotor (baik roda dua maupun empat) melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran patuh hukum dan aturan lalu lintas serta alasan lainnya seperti macetnya lalu lintas dan faktor mengejar waktu. Pelanggaran lalu lintas sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggota Satlantas Polresta Tangerang dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Tangerang. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi pendukung peran Satlantas Polresta Tangerang adalah perencanaan dan manajemen tugas yang dilakukan oleh

pimpinan (Kasatlantas) dan didukung oleh kemampuan dan kesiapan anggotanya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya jumlah personel, masih belum meratanya kegiatan pendidikan kejuruan di bidang lalu lintas yang diterima oleh anggota/personel Satlantas, dan sarana yang kurang memadai (khususnya untuk kendaraan bermotor). Adapun faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas Satlantas Polresta Tangerang adalah terjalinnya koordinasi yang sinergis antar sesama anggota Satlantas maupun dengan sejumlah institusi terkait seperti Dinas Perhubungan, pihak sekolah, dan media massa (untuk sosialisasi peraturan lalu lintas). Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan terutama dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Peranan dari Satlantas Polresta Tangerang dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya hingga saat ini sudah dilakukan cukup baik, upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Tangerang dalam menekan pelanggaran lalu lintas dilakukan baik secara pre-emptif, preventif, dan represif.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini terlihat adanya persamaan dan perbedaan yaitu:

1. Persamaan Penelitian
  - a. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
  - b. Mengedepankan kegiatan Dikmaslantas.
  - c. Pokok permasalahan pada pelanggaran lalu lintas.
2. Perbedaan Penelitian
  - a. Ferdiansyah meninjau peran Satlantas dalam menekan tingkat pelanggaran, sedangkan peneliti meninjau kepada upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.
  - b. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan.

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Dika Hadiyan Widya Wiratama (2013) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 60 dengan judul skripsi “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar SMP Di Polres Lamongan”

Dalam penelitian Dika Hadiyan Widya Wiratama dijelaskan bahwa ketidaktertiban dan kurang pemahamnya peraturan lalu lintas pelajar sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat “SMP” menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas, apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP di Kabupaten Lamongan, peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP di Polres Lamongan, dan faktor-faktor yang melemahkan peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP di Polres Lamongan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP di Kabupaten Lamongan, peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP di Polres Lamongan, dan faktor-faktor yang melemahkan peran Satlantas dalam

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP di Polres Lamongan.

Penelitian Dika Widya Wiratama memiliki kesimpulan, yaitu; a) Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP di Kabupaten Lamongan dikelompokkan menjadi faktor internal yang meliputi faktor keluarga, rendahnya pemahaman pelajar SMP terhadap hukum, dan kurangnya kesadaran akan hukum. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain pergaulan, jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah, minimnya alat transportasi, adanya kegiatan di luar jam sekolah, adanya jasa penitipan motor di luar sekolah, dan sedikitnya jumlah SMP yang ada di kecamatan. b) Peran Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan dalam penegakan hukum guna memberi efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP sudah sesuai SOP dan ketentuan yang ada, namun perlu ada kebijakan serta batasan tertentu. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi lingkungan, kebiasaan, dan karakteristik warga Lamongan. Berkaitan dengan permasalahan di atas adapun penegakan hukum oleh Satlantas Polres Lamongan yang selalu diawali dengan pendekatan edukatif adalah sebagai berikut: upaya preventif yang meliputi pengaturan lalu lintas pada jam berangkat dan pulang sekolah, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Selain itu dilakukan juga upaya represif dengan memberikan teguran yang bersifat simpatik untuk kasus pelanggaran ringan dan memberikan sanksi tilang pada jenis pelanggaran berat. c) Faktor yang melemahkan peran Satlantas Polres Lamongan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMP di Lamongan adalah faktor internal yang meliputi faktor personel yang seharusnya dibekali dengan pendidikan kejuruan, ketegasan petugas, organisasi kepolisian, serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yang melemahkan peran Satlantas adalah kebiasaan daerah dan faktor masyarakat yang sudah berkembang isu bahwa sanksi tilang bisa diselesaikan dengan cara damai.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini terlihat adanya persamaan dan perbedaan yaitu:

1. Persamaan Penelitian
  - a. Pokok permasalahan pada pelanggaran lalu lintas.
  - b. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
2. Perbedaan Penelitian
  - a. Dika Hadiyan W. Wiratama lebih meninjau peran Satlantas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan peneliti lebih kepada upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.
  - b. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan.

Secara garis besar, kedua penelitian di atas memiliki substansi yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Adapun perbandingan mengenai penelitian tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rangkuman Penelitian Terdahulu

PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAN	HASIL PENELITIAN
----------	-----------	----------	------------------

Ferdiansyah (2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.</li> <li>2. Mengedepankan kegiatan Dikmaslantas.</li> <li>3. Pokok permasalahan pada pelanggaran lalu lintas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferdiansyah meninjau peran Satlantas dalam menekan tingkat pelanggaran, sedangkan peneliti meninjau kepada upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.</li> <li>2. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan</li> </ol>	Peranan dari Satlantas Polresta Tangerang dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya hingga saat ini sudah dilakukan cukup baik, upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Tangerang dalam menekan pelanggaran lalu lintas dilakukan baik secara pre-emptif, preventif dan represif.
Dika Hadiyan Widya Wiratama (2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok permasalahan pada pelanggaran lalu lintas.</li> <li>2. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dika Hadiyan W. Wiratama meninjau peran Satlantas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan peneliti lebih kepada upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.</li> <li>2. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan</li> </ol>	penegakan hukum oleh Satlantas Polres Lamongan yang selalu diawali dengan pendekatan edukatif adalah sebagai berikut: upaya preventif yang meliputi pengaturan lalu lintas pada jam berangkat dan pulang sekolah, penjagaan, pengawalan dan patroli. Selain itu dilakukan juga upaya represif dengan memberikan teguran yang bersifat simpatik untuk kasus pelanggaran ringan dan memberikan sanksi tilang pada jenis pelanggaran berat.

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah oleh peneliti

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki Kompetensi terkait masalah yang diteliti.

### 2.2.1 Konsep

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep merupakan rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata dalam penelitian ini, maka disajikan beberapa konsep.

#### 2.2.1.1 Konsep Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan

sebuah strategi dalam mencapai tujuan. Upaya merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat), juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga suatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Berkaitan dengan rancangan penelitian ini, upaya sebagai usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah yang dimaksudkan adalah upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar di wilayah hukum Polres Magelang.

#### 2.2.1.2 Konsep Dikmaslantas

Dikmaslantas yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Hal tersebut dikarenakan, skripsi ini membahas tentang Dikmaslantas dalam meningkatkan kesadaran pelajar dalam disiplin berlalu lintas sehingga dengan demikian dapat memberikan kemudahan di dalam penulisan ini, dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas disebutkan bahwa Dikmaslantas:

Merupakan salah satu dari fungsi Lalu Lintas dan sebagai suatu upaya pencegahan di dalam menanggulangi masalah Lalu Lintas, mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dalam rangka pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas disebutkan bahwa tujuan sasaran dan keuntungan Dikmaslantas adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan

Tujuan daripada Dikmaslantas adalah untuk memperdalam dalam memperluas pengertian pada masyarakat untuk membantu rencana, kebijakan dan cara-cara yang di tempuh dalam penyelesaian, dan masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.

##### 2. Sasaran

Sasaran dalam Dikmaslantas dapat di bedakan dan di kelompokkan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat terorganisir:
  - PKS
  - Supeltas
  - Prasbara Lantas
  - Kamra Lantas

- Satpam, utamanya di pinggiran jalan raya
  - Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi
  - Instansi-instansi Dinas Pemerintah maupun swasta
- b. Masyarakat tidak terorganisir
- Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/perorangan
  - Pengguna jasa angkutan umum/pribadi
  - Masyarakat pemakai jalan lainnya
3. Keuntungan

Keuntungan daripada pendidikan lalu lintas dapat dicapai dengan tidak menghukum banyak orang yang tidak perlu dan lagi kurang bijaksana. Rencana pendidikan yang dijalankan dengan baik dan terus menerus akan mencapai lebih banyak orang jika dibandingkan dengan tindakan atau penegakan hukum, karena pendidikan yang dihadapkan dengan terus menerus akan dirasakan oleh setiap anggota dalam masyarakat.

#### 2.2.1.3 Konsep Kesadaran Berlalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya insaf, merasa, serta tahu dan mengerti. Kesadaran merupakan keadaan mengerti terhadap sesuatu hal. Sedangkan berlalu lintas merupakan kegiatan lalu lintas yang dilakukan sehingga kesadaran berlalu lintas adalah keadaan mengerti seseorang terhadap kegiatan lalu lintas yang dilakukannya apakah sesuai atau tidak. Manusia dalam kehidupannya dapat berlaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Kesadaran berlalu lintas akan didapatkan apabila adanya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Oleh karena itu upaya penyuluhan dilakukan terhadap pelajar agar pelajar mengetahui tentang peraturan lalu lintas yang berlaku, karena hal tersebut awal dari kesadaran hukum berlalu lintas timbul.

#### 2.2.1.4 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam bahan ajar F.T. Lalu Lintas Akademi Kepolisian (2013:159), pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan/atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda, tetapi dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

#### 2.2.1.5 Konsep Strategi Belajar Mengajar

Djamarah dan Zain (2014:5) menjelaskan bahwa secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan pendidik dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar.

Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan itu. Di sini terlihat apa yang dijadikan sebagai sasaran dari kegiatan belajar mengajar. Sasaran yang dituju harus jelas dan terarah. Oleh karena itu, tujuan pengajaran yang dirumuskan harus jelas dan konkret, sehingga mudah dipahami oleh anak didik. Bila tidak, maka kegiatan belajar mengajar tidak mempunyai arah dan tujuan yang pasti. Akibat selanjutnya, perubahan yang diharapkan terjadi pada anak didik pun sukar diketahui, karena penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan belajar mengajar. Karena itu rumusan tujuan yang operasional dalam belajar mengajar mutlak dilakukan oleh guru sebelum melakukan tugasnya disekolah (Djamarah dan Zain, 2014:6).

Kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup siswa. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang guru gunakan dalam memecahkan suatu kasus, akan mempengaruhi hasilnya (Djamarah dan Zain, 2014:6).

Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam mengajar (Djamarah dan Zain, 2014:7).

Keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Suatu program baru bisa dikatakan berhasil setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar yang lain (Djamarah dan Zain, 2014:8).

## 2.2.2 Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Untuk menganalisis hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 2.2.2.1 Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2014:5)

Pada kenyataannya, hukum yang di tegakkan di Indonesia masih banyak dilanggar terkhusus pada penelitian ini yaitu pelajar yang masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut Soekanto (2014:8),

mengemukakan bahwa masalah pokok dari penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral sehingga memberikan dampak positif dan negatif. Faktor-faktor tersebut yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### 2.2.2.2 Teori Komunikasi

Teori komunikasi merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia. Demikian besarnya peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi orang dapat mempengaruhi sikap orang lain dalam membentuk kerjasama dan mengambil keputusan. Littlejohn dan foss (2014:5), komunikasi merupakan sebuah proses menyamakan dua atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang. Komunikasi akan terjadi bila ada interaksi yang menghasilkan aksi dan reaksi. Tindakan komunikasi dapat dilakukan secara perorangan maupun melalui medium atau alat perantara tertentu. Komunikasi berasal dari bahasa latin *Communicare*, berarti berpartisipasi dan memberitahukan. Sarwono (1995:86), “komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada sasaran, didalam penyampaian pesan ini komunikasi biasanya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan ini yang sesungguhnya menjadi sasaran komunikasi”.

Dikutip dari buku Daryanto dan Rahardjo (2016:117), Formula Laswell, seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948 mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut

##### 1. Siapa (*Who*)

*Who* dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator, yaitu pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

##### 2. Berkata Apa (*Says What*)

*Says What* menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan.

##### 3. Melalui Saluran Apa (*In Which Channel*)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima), baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik).

4. Kepada Siapa (*To Whom*)

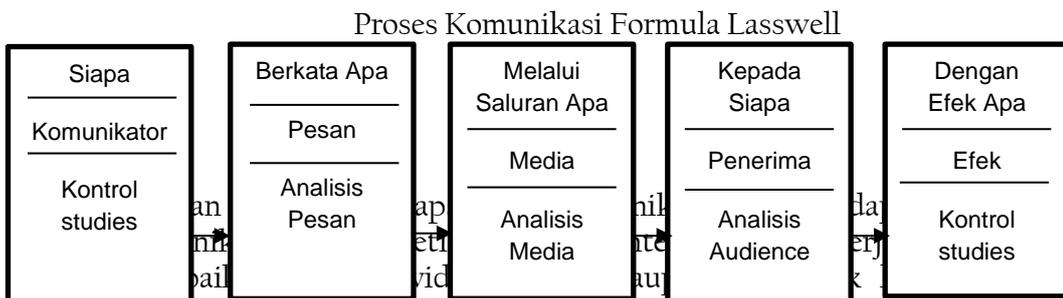
Seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, dan penyandi balik (*decoder*).

5. Dengan Efek Apa? (*With What Effect?*)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti, perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Ungkapan dalam bentuk pertanyaan yang dikenal sebagai Formula Lasswell ini, meskipun sangat sederhana atau terlalu menyederhanakan suatu fenomena komunikasi massa, telah membantu mengorganisasikan dan memberikan struktur pada kajian terhadap komunikasi massa. Selain dapat menggambarkan komponen-komponen dalam proses komunikasi massa, Lasswell sendiri menggunakan formula ini untuk membedakan berbagai jenis penelitian komunikasi. Hal ini dapat disimak pada visualisasi berikut:

Gambar 2.1



masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilakukan penelitian apakah upaya Unitdikyasa dalam melaksanakan kegiatan Dikmaslantas terhadap pelajar dalam mencegah pelanggaran lalu lintas telah berjalan dengan baik.

2.2.2.3 Teori Manajemen

Manajemen berasal dari perkataan *manage to man*. Kata *Manage* berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata *man* (manusia). Apabila kedua kata tersebut digabungkan, manajemen berarti mengelola atau mengatur manusia. Menurut Malayu S. P. Hasibuan, manusia (*man*) menjadi salah satu unsur sumber daya, selain *money*, *materials*, *machines*, *methods*, dan *market*, yang dibutuhkan suatu organisasi guna mencapai tujuan. (Karyoto, 2016:1)

Dalam buku Handoko (2009:8), James A. F. Stoner menyatakan bahwa: *Manajemen* adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas terlihat bahwa Stoner telah menggunakan kata *proses*, bukan *seni*. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah

kemampuan atau keterampilan pribadi. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

Menurut George R. Terry (2009:9) manajemen adalah segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan dan memelihara pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis, dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas tersebut, George R. Terry, menetapkan manajemen terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian). Garis besar dari empat hal tersebut adalah:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan seorang manajer. Kemudian perencanaan di bagi menjadi dua yaitu:

1. Perencanaan strategis dimana yang menjadi pokok adalah tujuan dari organisasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan permintaan terhadap jasa.
2. Perencanaan taktis mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing-masing pelaksana dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan, (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga

pencahariannya dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Terdapat empat komponen dalam pengorganisasian yakni:

1. Pekerjaan  
Fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut dipisah-pisahkan ke dalam sub-sub fungsi. Dari berbagai fungsi tersebut, dibentuk pekerjaan-pekerjaan yang dijadikan bagian-bagian yang kecil. Bagian-bagian pekerjaan tersebut disebut unit-unit kerja organisasi.
  2. Pegawai  
Setiap orang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Penugasan akan lebih baik apabila disertai perhatian terhadap kepentingan pegawai, setiap pengalaman dan ketrampilan. Penugasan yang diberikan kepada masing-masing individu merupakan bagian tugas-tugas organisasi atau dapat juga tugas dari suatu unit kerja.
  3. Hubungan kerja  
Merupakan hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan dengan pegawai lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya serta hubungan kerja antara anggota dan pimpinan. Keserasian dan kesatuan usaha dalam bekerja akan dapat terbangun dengan baik apabila hubungan tersebut terbina dengan cukup baik.
  4. Lingkungan  
Komponen pengorganisasian mencakup sarana-sarana fisik dan sarana umum di dalam lingkungan tempat pegawai melaksanakan tugas.
- c. *Actuating* (pelaksanaan)  
Pelaksanaan, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
- d. *Controlling* (pengawasan)  
Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry, 2009:18)

Pada teori manajemen, terdapat enam unsur yang membentuk manajemen yaitu:

a *Man* (Manusia)

Sarana utama bagi setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia. Tidak adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Manusia adalah orang yang mencapai hasil melalui kegiatan orang-orang lain.

b *Money* (Uang)

Untuk melakukan berbagai aktivitas perusahaan diperlukan uang. Uang yang digunakan untuk membayar upah atau gaji, membeli bahan-bahan dan peralatan. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan seefektif mungkin agar tujuan tercapai dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan.

c *Materials* (Material)

Material merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi, dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Tanpa adanya bahan maka proses produksi tidak akan berjalan.

d *Method* (Metode)

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode merupakan sarana manajemen untuk mencapai tujuan.

e *Machine* (Mesin)

Dengan kemajuan teknologi, pengguna mesin-mesin sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

f *Market* (Pasar)

Pasar merupakan sarana yang tidak kalah penting dalam manajemen, karena tidak adanya pasar, hasil produksi tidak akan ada artinya sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan lalu lintas yang timbul di Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Bahkan tidak sedikit akibat dari pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa dan kerugian materiil. Berdasarkan data Satlantas bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar tinggi.

Upaya pencegahan dilakukan dengan mengedepankan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas. Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, salah satu kegiatan yang menjadi tugas Satlantas adalah melaksanakan Dikmaslantas. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan Dikmaslantas menjadi salah satu instrumen penyelesaian masalah yang mana akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar, Unitdikyasa melakukan upaya Dikmaslantas untuk mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut, maka digunakan beberapa teori dan konsep untuk menemukan pokok permasalahan serta pemecahan yang semestinya diberlakukan dalam upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar. Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei 2003, konsep upaya, konsep Dikmaslantas, konsep pelanggaran lalu lintas, konsep kesadaran berlalu lintas, konsep strategi belajar mengajar, teori komunikasi, dan teori manajemen.

Sebagai ilustrasi dari kerangka berpikir, dibuatlah suatu bagan yang menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian konsep dan teori yang ada digunakan dalam menjabarkan permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditentukan suatu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar, baik dari pelaksanaan, kemampuan petugas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Dikmaslantas.

Dalam penelitian ini, digambarkan secara utuh tentang objek yang menjadi penelitian. Artinya bahwa penelitian ini tidak terfokus pada sebagian dari objek yang diteliti melainkan memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Menurut Creswell (2013:258), "Prosedur-prosedur kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademik ketimbang metode-metode kuantitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Dengan demikian, penelitian ini akan lebih tepat untuk digambarkan dan dijelaskan dengan uraian kata-kata dan laporan informasi secara mendalam dan menyeluruh, bukan dengan data angka yang diolah dengan metode statistik. Data angka hanya pendukung dalam untuk menggambarkan permasalahan secara rinci.

#### 3.1.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*. Menurut Kanneth Sugiyono (2015:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi. menggunakan metode *field research* berguna untuk mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. *Field Research* dipilih peneliti dengan tujuan untuk menjajaki atau mengungkap fakta dan untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang di teliti.

### 3.2 Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, masalah yang akan dipecahkan, selain juga pada faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Munculnya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Magelang merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera ditangani karena dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, batasan permasalahan yang diambil adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Magelang. Pokok persoalan yang diteliti meliputi pelaksanaan Penyuluhan Dikmaslantas, kemampuan personel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penyuluhan Dikmaslantas.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Magelang yang berada pada wilayah hukum Polres Magelang. Adapun rincian wilayah hukum Polres Magelang sebagai berikut:

Kabupaten magelang merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari propinsi Jawa Tengah yang diapit oleh beberapa kabupaten dan kota, yaitu; Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, dan Kota Magelang serta berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara geografis berada antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" bujur timur dan antara 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" lintang selatan.

Wilayah hukum Polres Magelang memiliki luas daerah sebesar 1.085.73 km<sup>2</sup>/108.573 Ha yang terdiri dari 21 Kecamatan, dimana masing-masing Kecamatan memiliki batas-batas wilayah. Adapun penjelasan mengenai batas-batas wilayah yang dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Wilayah Kabupaten Magelang

N O	KECAMATAN	LUAS DAERAH (Km <sup>2</sup> )	BATAS DAERAH			
			SEBELAH UTARA	SEBELAH TIMUR	SEBELAH SELATAN	SEBELAH BARAT
01	02	03	04	05	06	07
1	Muntilan	28,61	Mungkid	Dukun	Salam, Ngluwar	Borobudur
2	Salam	31,63	Muntilan	Srumbung, Sleman	Kab. Sleman	Ngluwar
3	Ngluwar	22,44	Muntilan	Salam	Kab. Sleman	Kab.Kulonpro go
4	Srumbung	53,17	Dukun	Kab. Sleman	Kab. Sleman	Salam
5	Dukun	53,40	Sawangan	Kab. Boyolali	Srumbung	Muntilan
6	Mungkid	37,42	Candimulyo	Sawangan	Muntilan	Mertoyudan & Borobudur
7	Sawangan	72,37	Candimuly, Pakis	Kab. Boyolali	Dukun, Muntilan	Mungkid
8	Tegalrejo	35,39	Secang, Grabag	Pakis	Candimulyo	Kota Magelang
9	Mertoyudan	45,35	Kota Magelang	Candimulyo dan Mungkid	Borobudur, Tempuran	Tempuran
10	Candimulyo	46,95	Tegalrejo	Pakis	Mungkid dan Sawangan	Mertoyudan

11	Pakis	69,95	Grabag, Ngablak	Sawangan	Sawangan	Tegalrejo & Candimulyo
12	Grabag	77,15	Kab. Semarang	Ngablak	Pakis	Secang dan Tegalrejo
13	Secang	47,34	Semarang, Temanggung	Grabag	Kota Magelang	Windusari
14	Ngablak	43,80	Kab. Semarang	Kab. Semarang	Pakis	Grabag
15	Salaman	68,87	Kajoran	Tempuran, Borobudur	Kab.Kulonpro go	Kab. Purworejo
16	Borobudur	54,55	Tempuran dan Mertoyudan	Mungkid dan Muntilan	Kab.Kulonpro go	Salaman
17	Tempuran	49,04	Bandongan	Mertoyudan	Borobudur	Salaman
18	Kajoran	83,41	Kaliangkrik	Kaliangkrik, Tempuran	Salaman	Kab. Wonosobo
19	Bandongan	45,79	Windusari	Kota Magelang	Tempuran & Mertoyudan	Kaliangkrik
20	Kaliangkrik	57,35	Windusari	Bandongan	Tempuran	Kajoran
21	Windusari	61,65	Kabupaten Temanggung	Secang	Bandongan	Kaliangkrik

Sumber: Intel Dasar Polres Magelang, 2017

Gambar 3.1  
Peta Wilayah Kabupaten Magelang



**KETERANGAN:**

- : IBU KOTA KECAMATAN / DESA;
- ..... : BATAS DESA;
- ==== : JL. PROPINSI / KABUPATEN;
- ==== : JL. KABUPATEN;
- ▲ : GUNUNG;
- - - - : SUNGAI;
- \_\_\_\_\_ : JL. DESA.

### 3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen (Moleong, 2013:157). Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sumber data utama atau primer, sumber data tambahan atau sekunder, dan sumber data tersier.

#### 3.4.1 Sumber Data Primer

Merujuk pada pernyataan Lofland di atas, maka sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber primer yaitu:

- a. Wakapolres Magelang (Kopol Heru Budiharto, S.I.K., M.I.K.), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan masyarakat khususnya pelajar yang ada di Kabupaten Magelang dikaitkan dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku.
- b. Kasat Lantas Polres Magelang (AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K.), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah satuan fungsi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.
- c. Kanit Dikyasa Polres Magelang (Iptu Jeminten), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Dikmaslantas yang dilakukan di sekolah-sekolah Kabupaten Magelang.
- d. Anggota Unitdikyasa Polres Magelang (Brigadir Maryanto), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam bentuk upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.
- e. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Brorbudur (Umi Khayah Rusiyanah, S.Pd.), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dukungan yang diberikan kepada personel Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Magelang dalam melaksanakan pelaksanaan Dikmaslantas.
- f. Pelajar SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Erwin Dwi Kurniawan), bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan teknik penyampaian materi yang paling tepat serta hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan.

#### 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Masih merujuk pada sumber data menurut Lofland, maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar yang difokuskan kepada Unitdikyasa baik dari pelaksanaan Dikmaslantas, kemampuan petugas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Dikmaslantas. Sumber data sekunder sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari Satlantas Polres Magelang, peraturan perundang-undangan, beberapa buku, serta dokumen lain yang terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna akademi kepolisian (2016:19), teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen seperti kuisisioner, atau pedoman pengumpulan data: pedoman wawancara, pedoman pengamatan, dan pedoman pemeriksaan dokumen sesuai dengan kepentingan dan pendekatannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 3.5.1 Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Wawancara merupakan sarana untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan, dengan wawancara peneliti dapat mengungkapkan dan berbicara secara langsung untuk menanyakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang telah di buat oleh peneliti. (Moleong, 2013:186)

#### 3.5.2 Teknik Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2012:220). Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti sangat membantu dan bermanfaat dalam penelitian ini, karena dengan pengamatan secara langsung maka peneliti akan mengetahui sejauh mana upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah (*participation observer*).

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan Bugin dalam Prastowo (Prastowo, 2012:220). Peneliti akan terjun langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kabupaten dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar. Tujuan dari observasi partisipan adalah peneliti akan mendapatkan banyak informasi yang tidak diperolehnya pada saat wawancara. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan bersifat seobjektif mungkin.

### 3.5.3 Studi Dokumen

Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2016:25), studi dokumen sering juga disebut teknik dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data ini lebih mudah, dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. Dokumen merupakan hasil pekerjaan seseorang atau institusi dalam melaksanakan tugas pokok, dokumen dapat berupa surat, Visum et Repertum, laporan polisi, laporan intelijen, laporan pelaksanaan tugas, berita acara, surat perintah, dan lain-lainnya. Dengan data dokumen yang diperoleh peneliti, maka peneliti dapat melakukan analisis apakah sesuai dengan data lainnya atau menyimpang. Bila data dokumen tersebut menyimpang dari data lainnya, maka peneliti harus mengadakan wawancara dan observasi untuk mengetahui data penyimpangan tersebut.

## 3.6 Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Denzin (Moleong, 2013:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, dengan menggunakan, konsep upaya, konsep Dikmaslantas, konsep strategi belajar mengajar, konsep kesadaran berlalu lintas, konsep pelanggaran lalu lintas, teori komunikasi, dan teori manajemen. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang

didapat merupakan data *valid* dan *reliable* yang menentukan kualitas dari hasil penelitian yang didapat dari pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa catatan-catatan ataupun rekaman-rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan yang kemudian dialihkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun rapih dan teratur, kemudian dikombinasikan oleh peneliti agar menjadi lebih akurat dan memiliki gambaran jelas tentang kinerja satuan lalu lintas dalam tercapainya pencegahan pelanggaran lalu lintas pelajar di wilayah Kabupaten Magelang.

Proses analisis data pada penelitian kualitatif yang disadur dalam penelitian skripsi David Adhi Kusuma (2012), menurut Miles dan Huberman (1985) menjelaskan ada 3 (tiga) unsur utama yaitu “reduksi data, sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

### 3.7.1 Reduksi Data

Menurut Sujarweni (2014:35), reduksi data merupakan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, di rangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

### 3.7.2 Sajian Data

Sajian merupakan susunan atau cara yang dilakukan untuk menyajikan data yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu analisis atau temuan lain berdasarkan pemahamannya. Penyajian dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel, mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. (Muhammad dan Djaali, 2005:97)

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98), kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang di buat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan dengan cara menganalisis data dan fakta yang sudah diperoleh dengan teori dan konsep yang digunakan guna membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas

pelajar di wilayah hukum Polres Magelang. Hasil dari analisa yang dilakukan akan dituangkan ke dalam kesimpulan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar di Kabupaten Magelang dan Analisis

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai gambaran pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang dan analisis pelanggaran lalu lintas pelajar menggunakan teori penegakkan hukum.

#### 4.1.1 Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar

Berdasarkan data Minops Satlantas Polres Magelang tahun 2017, didapatkan data mengenai pelanggaran lalu lintas dalam periode 2014 s.d. 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Data Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau dari Profesi

NO	PROFESI	2014	2015	2016	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1	PEGAWAI NEGERI	168	25	374	567
2	KARYAWAN SWASTA	20.923	16.445	13.021	50.389
3	PELAJAR	3.555	4.858	4.774	13.187
4	MAHASISWA	1.994	5.015	6.171	13.180
5	PENGEMUDI BIASA	1.013	1.684	2.847	5.544
6	PENGEMUDI UMUM	932	1.311	1.726	3.969
7	TNI	0	0	0	0
8	POLRI	0	0	0	0
9	LAIN-LAIN	76	345	0	421
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polres Magelang, karyawan swasta merupakan pelanggar lalu lintas paling tinggi dengan jumlah sebanyak 50.389. Kedua adalah pelajar dengan jumlah sebanyak 13.187 pelanggar. Urutan ketiga adalah mahasiswa dengan jumlah 13.180 pelanggar. Nomor empat adalah pengemudi biasa dengan jumlah pelanggar mencapai 5.544 pelanggar. Urutan kelima adalah pengemudi umum dengan jumlah sebanyak 3.969 pelanggar. Urutan enam terdapat pegawai negeri dengan jumlah 567 pelanggar. Dan yang terakhir lain-lain dengan jumlah 421 pelanggar. Faktor dipilihnya pelajar sebagai bahan penelitian walaupun pelajar tidak merupakan kasus tertinggi di wilayah hukum Polres Magelang adalah pelajar merupakan penerus bangsa. Apabila pelajar tidak dibekali pemahaman tentang lalu lintas sejak dini, maka pada saat dewasa nanti juga akan berlaku serupa, yaitu melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara tertib berlalu lintas. Pelajar merupakan tunas muda, yang pada saat nanti kelak akan meneruskan pembangunan bangsa Indonesia. Mereka yang nantinya akan mewarnai bangsa Indonesia melalui karya-karya mereka. Salah satu wujud pelajar merupakan

penerus bangsa, mereka yang nantinya akan bekerja untuk membangun bangsa ini. Salah satu pekerjaan yang ada adalah menjadi karyawan swasta. Hal tersebut apabila dikaitkan kembali dengan data di atas, bahwa karyawan swasta yang memiliki angka paling tinggi jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Magelang. Hal tersebut salah satunya merupakan dampak bahwa pada saat remaja dahulu, tidak dibekali pendidikan yang cukup tentang berlalu lintas. Akibat yang ditimbulkan adalah mereka melanggar peraturan dan tata tertib berlalu lintas. Harapannya adalah pelajar sebagai tunas bangsa agar memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas, karena lalu lintas sendiri adalah salah satu aspek manusia dalam beraktivitas.

Berdasarkan data di atas juga menunjukkan bahwa hukum dan sanksi tentang pelanggaran lalu lintas kurang berpengaruh terhadap pelajar. Sebagaimana disampaikan oleh Wakapolres Magelang, Kompol Heru Budiharto, S.I.K, M.I.K., yang mengatakan:

Hukum tentang pelanggaran lalu lintas sudah ditegakkan, sanksi sudah diberikan, namun pada setiap operasi Dakgar, angka pelanggaran lalu lintas khususnya pada pelajar masih tergolong tinggi. Hal ini berarti kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar lalu lintas, khususnya pelajar. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Tabel 4.2  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari SIM Pelanggar

NO	GOLONGAN SIM	2014	2015	2016	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1	A	949	1.420	4.567	6.936
2	A UMUM	0	0	0	0
3	B.I	536	936	1.216	2.688
4	B.I. UMUM	584	1.597	2.618	4.750
5	B.II	389	928	590	1.907
6	B.II UMUM	695	1.730	1.796	4.221
7	C	9.842	8.656	7.862	26.360
8	A KHUSUS	0	0	0	0
9	TANPA SIM/KIR	15.666	14.506	10.264	40.436
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pelanggar terbanyak adalah pengendara yang tidak memiliki SIM/KIR sebesar 40.436 sedangkan yang menempati urutan berikutnya adalah pengendara sepeda motor sebesar 26.360, dan yang terkecil adalah B.II sebanyak 1.907 pengemudi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan rata-rata pelanggar ditinjau dari SIM pelanggar kebanyakan tidak memiliki SIM. Apabila dikaitkan dengan pekerjaan pelanggar, pelajar tentunya berpotensi besar tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti contohnya SIM dan STNK. Sebagaimana diungkapkan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Banyak dari pelajar yang melanggar peraturan tidak membawa surat kelengkapan, baik STNK atau SIM. Hal tersebut dikarenakan pelajar yang melanggar tidak semuanya sudah memiliki SIM, karena syarat

memperoleh SIM adalah berusia minimal 17 tahun. Jadi, ada pelajar SMP bahkan SD sudah mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut sebagai salah satu faktor tingginya pelanggaran yang tidak memiliki SIM. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Tabel 4.3  
Data Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau dari Segi Jenis Kendaraan Bermotor

NO	RANMOR	2014	2015	2016	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1	BUS	0	0	851	851
2	TRUCK	1.083	3.522	2.261	6.866
3	PICKUP	519	3.241	2.957	6.717
4	MINIBUS	794	2.491	3.575	6.860
5	JEEP	96	1.044	711	1.851
6	SEDAN	406	999	1.030	2.435
7	MKL	0	0	0	0
8	MM	0	0	0	0
9	TAXI	0	0	0	0
10	RODA TIGA	0	0	0	0
11	RODA DUA	25.763	18.476	17.528	61.767
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pengendara sepeda motor atau roda dua merupakan pelanggaran yang mendominasi apabila dibandingkan dengan pengguna Ranmor lainnya, yaitu sebesar 61.767. sedangkan jumlah terkecil adalah pengendara Bus dengan jumlah 851.

Tabel 4.4  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Segi Usia

NO	USIA	2014	2015	2016	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1	0-15 TAHUN	656	4.380	2.305	7.341
2	16-30 TAHUN	13.392	11.636	11.173	36.201
3	31-40 TAHUN	10.527	10.353	10.439	31.319
4	41-50 TAHUN	3.210	2.811	3.949	9.970
6	51 KEATAS	876	593	1.047	1.640
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa usia pelanggaran lalu lintas tertinggi adalah usia 16-30 tahun dengan jumlah 36.201 pelanggaran. Usia tersebut merupakan usia produktif bagi manusia untuk dapat melakukan segala aktivitasnya. Sedangkan yang terkecil terdapat pada usia 51 keatas yang berjumlah 1.640 pelanggaran. Pada usia produktif tersebut salah satunya adalah pelajar. Pelajar yang berusia antara 16-30 tahun sudah dapat menemukan jati dirinya. Contohnya, berawal dari mencoba menggunakan sepeda motor hingga menggunakannya dalam sehari-hari. Pelajar dalam beraktivitas sudah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor, jadi pelajar tersebut harus dibekali peraturan-peraturan dan berkendara yang baik dan benar. Jika pelajar tidak

diberi pengertian dan pemahaman tersebut, maka pelajar tersebut akan melanggar hal tersebut, bahkan bisa menjadi budaya dalam diri pelajar itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Wakapolres Magelang, Kopol Heru Budiharto, S.I.K., M.I.K., menyatakan bahwa:

Pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang khususnya, namun saya pikir ini juga secara umum secara global terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dimana tingkat pengetahuan masyarakat pada umumnya khususnya juga para pelajar itu, sebenarnya mereka sudah taraf mengetahui dan memahaminya, pelanggaran-pelanggaran itu akan berkonsekuensi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain itu tidak berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran, karena mungkin di pemikiran mereka bahwasannya hal-hal yang sifatnya masih dalam ranah abu-abu, permisif, maksud permisif begini “masih ada alasan pemaaf dan mungkin ada alasan pembenar daripada si calon pelanggar atau si calon korban terjadinya kecelakaan lalu lintas”. Saya tidak menggunakan helm karena saya hanya menyebrang menggunakan kendaraan dalam jarak yang tidak terlalu jauh di wilayah jalan kampung katakan seperti itu, hal-hal permisif yang seperti itu, pembenaran seperti itu, akhirnya menjadikan yang bersangkutan si calon pelanggar atau si calon korban kecelakaan lalu lintas akhirnya membiarkan dirinya menjadi rentan terhadap terjadinya suatu pelanggaran ataupun suatu korban, menjadi korban kecelakaan lalu lintas. (Wawancara, 10 Maret 2017)

Tabel 4.5  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Segi Jenis Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	2014	2015	2016	JUMLAH
01	02	03	04	05	06
1	SURAT-SURAT	9.654	5.585	9.718	24.957
2	SYARAT PERLENGKAPAN	2.910	5.575	5.883	14.368
3	MARKA/RAMBU/ARUS	13.948	13.525	5.242	32.715
4	MUATAN	1.459	4.182	2.358	7.999
5	KECEPATAN	0	0	0	0
6	LAIN-LAIN	313	905	4.065	5.283
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.661</b>	<b>29.773</b>	<b>28.913</b>	<b>87.347</b>

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilanggar adalah marka/rambu/arus sebesar 32.715. Jenis pelanggaran tersebut merupakan jenis pelanggaran yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Marka/rambu/arus merupakan komponen-komponen yang telah dibuat oleh Unitdikyasa, khususnya bagian Rekayasa lalu lintas. Apabila hal tersebut dilanggar, maka resiko untuk timbul kecelakaan lalu lintas cukup besar. Dampak yang ditimbulkan pun besar, baik dari korban kecelakaan tersebut maupun dari segi materiil.

Tabel 4.6  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Segi Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016	JUMLAH
----	---------------	------	------	------	--------

01	02	03	04	05	06
1	PRIA	24.629	19.198	19.983	63.810
2	WANITA	4.032	10.575	8.930	23.537
	JUMLAH	28.661	29.773	28.913	87.347

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari pelanggaran yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pelanggar pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pria berjumlah 63.810 sedangkan wanita berjumlah 23.537 pelanggar.

#### 4.1.2 Analisis Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar Berdasarkan Teori Penegakkan Hukum

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pelajar di Kabupaten Magelang, peneliti menggunakan teori penegakkan hukum sebagai pisau analisis untuk membahas tentang penyebab pelajar di Kabupaten Magelang melakukan pelanggaran tersebut. Peneliti menganalisis bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di Magelang dipengaruhi oleh penegakkan hukum kepada pelajar tersebut tentang tertib berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.

##### 4.1.2.1 Faktor Hukumnya sendiri

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pelanggaran lalu lintas dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum dan sanksi sudah dibuat tetapi jumlah pelanggar lalu lintas khususnya pelajar, menempati posisi nomor dua setelah karyawan swasta.

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Magelang diatas juga menunjukkan bahwa hukum dan sanksi tentang pelanggaran lalu lintas kurang berpengaruh terhadap pelajar. Hal tersebut diperkuat dengan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Sebagaimana disampaikan oleh Wakapolres Magelang, AKBP Heru Budiharto, S.I.K, M.I.K. yang mengatakan bahwa:

Hukum tentang pelanggaran lalu lintas sudah ditegakkan, sanksi sudah diberikan namun pada setiap operasi Dakgar angka pelanggaran lalu lintas khususnya pada pelajar masih tergolong tinggi. hal ini berarti kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar lalu lintas khususnya pelajar. (Wawancara, 10 Maret 2017)

##### 4.1.2.2 Faktor penegak hukum

Pada penelitian ini, tingginya jumlah pelanggar lalu lintas pelajar dipengaruhi faktor penegak hukum yaitu instansi Polri khususnya Polantas yang menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pelanggaran lalu lintas. Mentalitas Polantas sebagai penegak hukum merupakan titik sentral pada proses penegakkan hukum.

Hal ini disebabkan karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk. Pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas karena menilai bahwa masih terdapat oknum polisi sebagai penegak hukum juga tidak menerapkan hukum dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pelajar yang menjadi sasaran kegiatan, Erwin, "saya pernah melihat juga polisi yang masih melanggar peraturan seperti menerobos lampu." (Wawancara, 5 Maret 2017). Kasat Lantas Polres Magelang telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah timbulnya *mindset* masyarakat tentang perilaku anggotanya yang kurang baik antara lain memberikan himbauan kepada anggota Satlantas pada setiap apel pagi agar selalu menjadi panutan bagi masyarakat dengan menaati peraturan sendiri yaitu peraturan tentang berlalu lintas. Hal ini berdasarkan pada wawancara dengan Kasat Lantas Polres Magelang, AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K., yang mengatakan bahwa:

Setiap apel pagi, mau itu saya atau perwira lain yang mengambil, saya tidak bosan bosannya untuk menghimbau anggota saya sendiri untuk jadi panutan bagi masyarakat di Kabupaten Magelang ini dengan memberi contoh untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas sekecil apapun. Kita harus menghilangkan *mindset* bahwa anggota polisi itu kelakuannya buruk. (Wawancara, 7 Maret 2017)

Dengan adanya himbauan tersebut, diharap anggota polisi lalu lintas dapat menjadi panutan bagi masyarakat khususnya pelajar dalam tertib berlalu lintas.

#### 4.1.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Pada penelitian ini, sarana dan fasilitas sangat berpengaruh terhadap penegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pelanggaran lalu lintas. Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan anggaran yang cukup. Pada Satlantas Polres Magelang, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil yang dalam hal ini sudah mendapatkan Dikjur Lintas hanya 18 personel dari 114 personel satuan lintas. Hal ini berdasarkan data jumlah personel Satlantas Polres Magelang bulan Februari 2017.

#### 4.1.2.4 Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran lalu lintas pelajar adalah dari pelajar itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pelajar sendiri akan peraturan dan tata tertib berlalu lintas. Hal ini menyebabkan pelajar cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Magelang, AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K., mengatakan bahwa:

Hukum dan sanksi tentang pelanggaran lalu lintas sudah ditegakkan, tetapi masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan khususnya

pelajar di Kabupaten Magelang ini. Kesadaran mereka akan peraturan dan tata tertib berlalu lintas sangat kurang. (wawancara, 7 Maret 2017).

Selain kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas, pelajar di Kabupaten Magelang kurang akan pengetahuan tentang pelanggaran dan tata tertib berlalu lintas. Hal tersebut yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Magelang.

#### 4.1.2.5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di suatu lingkup masyarakat sangat berpengaruh dengan penegakkan hukum yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Hasil temuan peneliti, ada hal yang menjadi budaya atau kebiasaan mengapa pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu tempat tinggal pelajar yang jauh dari lokasi sekolah dan kendaraan umum yang jangkauannya tidak sampai pada tempat tinggal pelajar sedangkan pelajar dituntut untuk tepat waktu sampai di sekolah. Karena hal tersebut banyak pelajar yang seharusnya belum mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sudah menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah. hal tersebut tidak terlepas dari peran orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk menggunakan kendaraan bermotor padahal belum memiliki SIM. Kemudian pelajar tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap rekan-rekannya sehingga akan mengikuti pelajar tersebut untuk menggunakan kendaraan bermotor tanpa SIM dan akhirnya menjadi kebiasaan dan membudaya untuk tidak membuat SIM. Hal ini diperkuat dengan wawancara pelajar Muhammadiyah Borobudur, Rezza Andrean sebagai salah satu pelanggar lalu lintas dengan kategori tidak memiliki SIM, mengatakan bahwa,

Rumah saya jauh kak, angkutan umum tidak lewat di desa saya sedangkan saya harus ke sekolah tepat waktu. Kemudian saya menggunakan motor keluarga walaupun saya tidak punya SIM. Orang tua saya dua-duanya kerja jadi tidak ada waktu untuk mengantar saya ke sekolah, jadi saya diberikan izin untuk mengendarai motor sendiri. (Wawancara, 5 Maret 2017)

## 4.2 Upaya Dikmaslantas Oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan Dikmaslantas yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar oleh Satlantas Polres Magelang, berdasarkan aspek yang menjadi kajian sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Kapolri (Perkap) adalah sebagai berikut.

### 4.2.1 Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa

Dikmaslantas dilaksanakan oleh Unitdikyasa satuan lalu lintas polres magelang yang memberikan tujuan sebagai tindakan pre-emptif terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang,

Iptu Jeminten, dan dibantu oleh dua anggota yaitu Brigadir Maryanto dan Bripta Diana. Sedangkan Kasat Lantas adalah sebagai pembina serta pengawas fungsi lalu lintas, khususnya dalam hal ini adalah pendidikan pelajar yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Unitdikyasa. Dalam pelaksanaan Dikmas Lantas, pihak kepolisian selalu bekerjasama dan berkoordinasi antar pihak, baik pihak sekolah ataupun lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Kami selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah, karena sekolah pun harus tetap melaksanakan kurikulum pembelajaran. Pelaksanaan Dikmas Lantas sendiri mengambil waktu jam kosong dari para pelajar, seperti pada saat upacara dan jam kosong yang memang tidak ada jam pelajaran, karena kalau pelaksanaan dilakukan pada saat terdapat jam pelajaran, akan mengganggu kegiatan pembelajaran dan murid juga tidak antusias. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Selain itu Kanitdikyasa bertugas untuk melaporkan kegiatan Dikmas Lantas kepada Kasat Lantas, sehingga setiap pelaksanaan dapat dipantau dan diawasi oleh Kasat Lantas selaku pembina fungsi.

Pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar dalam upaya mencegah perilaku melanggar dilaksanakan di sekolah-sekolah secara bergiliran. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran Dikmas Lantas dipilih sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kanitdikyasa. Pelaksanaan tersebut didahulukan kepada sekolah yang dinilai banyak atau cenderung memiliki sikap melanggar lalu lintas yang tinggi dari segi pelajar. Berdasarkan jumlah sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Magelang, belum seluruhnya mendapatkan Dikmas Lantas. Hal tersebut dikarenakan terdapat sejumlah masalah dan kendala, baik dalam cakupan anggaran maupun keterbatasan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan Dikmas Lantas sendiri dilaksanakan oleh seluruh anggota Unitdikyasa yang terdiri dari Kanitdikyasa dan dua orang anggota unit. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Jumlah personel pada Unitdikyasa dilihat dari prosedur seharusnya masih kurang. Jumlah Unitdikyasa terdiri dari satu kanit dan empat anggota, tetapi pada Sat Lantas Polres Magelang hanya terdiri dari satu kanit dan dua anggota. Hal tersebut menjadikan tugas dalam memberikan Dikmas Lantas menjadi kurang maksimal. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapat informasi bahwa kendala kurangnya personel dialami oleh Unitdikyasa sehingga menghambat kegiatan Dikmas Lantas.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka pembahasan difokuskan kepada pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unitdikyasa Sat Lantas Polres Magelang. Oleh karena itu, Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa akan dianalisis dari sudut pandang manajemen (pelaksanaan) dan kemampuan petugas dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas pelajar.

#### 4.2.1.1 Pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unitdikyasa

Penyelenggaraan Dikmas Lantas oleh Unitdikyasa Sat Lantas Polres

Magelang dijabarkan dalam empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (analisa dan evaluasi) kegiatan.

a. *Planning* (Perencanaan)

Sebelum melaksanakan kegiatan Dikmaslantas personel Unitdikyasa menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Personel yang bertugas menyiapkan materi adalah Bripda Diana dan Brigadir Maryanto. Pembuatan materi disesuaikan dengan rengiat yang sudah dibuat di awal bulan. Apabila terdapat materi yang tidak diketahui, Kanitdikyasa memberikan petunjuk berupa pokok-pokok pembahasan untuk selanjutnya dibuat materinya, sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Dalam pembuatan materi ada anggota saya yang menyiapkan dan membuat materi yaitu Bripda Diana dan Brigadir Maryanto. Materi yang diberikan lebih mengacu pada *safety riding*, dimana dalam materi tersebut disebutkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor yang baik dan benar, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, dan dampak yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Materi yang diberikan dalam pelaksanaan Dikmaslantas dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik dan tidak membosankan, contohnya; dalam slide paparan diberikan gambar dan video, dengan begitu para pelajar lebih tertarik dan antusias mengikuti Dikmaslantas tersebut.

Selanjutnya, Kanitdikyasa melaksanakan koordinasi dengan pihak sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Dikmaslantas. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas tidak dilaksanakan secara mendadak dan sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan tujuan agar jadwal dari kegiatan Dikmaslantas tidak bertabrakan dengan kegiatan sekolah. Koordinasi dengan sekolah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Dalam koordinasi dari pihak sekolah tidak selalu dalam bentuk surat dari Kepolisian kepada pihak Sekolah, tetapi dapat juga dilaksanakan dalam bentuk lisan dengan alat komunikasi. Hal tersebut dikarenakan terkadang pihak sekolah sendiri yang minta untuk diberikan Dikmaslantas, selain itu apabila dengan surat maka akan lama juga dalam birokrasinya. Jadi kami mencari jalan yang lebih praktis, seperti contohnya memberi tahu lewat alat komunikasi. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Kemudian, Kanitdikyasa mengecek persiapan sarana dan prasarana yang harus dibawa dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Secara khusus, dalam penyelenggaraan kegiatan Dikmaslantas tidak terdapat proses pengorganisasian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas dilakukan oleh seluruh anggota Unitdikyasa karena memang jumlah personelnnya terbatas, bahkan cenderung tidak memenuhi standar dari perkap no 23 tahun 2010. (disadur dari wawancara

dengan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten, 8 Maret 2017). Adapun Pembagian tugas Unitdikyasa dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas, yaitu; Iptu Jeminten sebagai pemberi mater, Bripda Diana sebagai operator dan Brigadir Maryanto sebagai dokumentasi. Dengan demikian tidak terbentuk tim khusus dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dikmaslantas.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan Dikmaslantas dimulai dengan pengenalan identitas petugas, seperti nama, satuan fungsi, dan tujuan dari diadakan Dikmaslantas tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kanitdikyasa, Iptu Jeminten, (Wawancara, 8 Maret 2017), “Saya pasti memperkenalkan diri dulu dan memberitahukan tujuan kami datang ke sekolah mereka”.

Selanjutnya, materi Dikmaslantas diberikan kepada pelajar oleh Kanitdikyasa Iptu Jeminten. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses pemberian materi didukung dengan pemanfaatan media seperti laptop dan LCD proyektor. Sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Maryanto (Wawancara, 8 Maret 2017), “Unitdikyasa tidak menggunakan komputer tetapi laptop, karena dalam pengoperasional lebih mudah dibawa kemana-mana”. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten (Wawancara, 8 Maret 2017), “dalam pemberian materi Dikmaslantas menggunakan laptop yang kita bawa tetapi kalau pengeras suara di sediakan oleh pihak sekolah”. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Unitdikyasa masih kurang, seperti yang disampaikan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten tersebut.

Materi Dikmaslantas dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas lebih ditekankan pada tata tertib dan bagaimana tata cara berkendara yang baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan, pelajar di wilayah hukum Polres Magelang sangat kurang dalam memahami tata tertib dan peraturan-peraturan dalam berkendara. Jadi, masih banyak ditemukan pelajar yang melanggar peraturan dan tata tertib berlalu lintas. Berawal dari budaya melanggar tersebut, maka dapat berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Sebagaimana di jelaskan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Dalam kegiatan Dikmaslantas, materi yang kita sampaikan kepada pelajar yaitu tentang *safety riding*, jadi kita menyampaikan aturan-aturan tentang berkendara, bagaimana berkendara yang baik dan benar, serta kami sampaikan juga bahayanya apabila melanggar aturan tersebut dan contoh-contoh kecelakaan yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Diakhir penyuluhan, petugas memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menyampaikan pertanyaan. Diberikan sesi tanya jawab dalam kurun waktu tertentu, sehingga pelajar langsung mendapatkan tanggapan terhadap pertanyaan mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten, menjelaskan bahwa:

Agar para pelajar lebih memahami apa yang dirasa masih kurang, kami selalu memberikan sesi tanya jawab di akhir pemberian materi. Tanya jawab tersebut ditujukan agar pelajar tersebut lebih mengerti berbagai hal apabila dalam penyampaian kami belum mencakup hal tersebut. (Wawancara, 8 Maret 2017)

d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam rangka kegiatan Dikmaslantas, Kasatlantas selalu melakukan pengawasan atau pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasatlantas AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K., bahwa:

Saya tidak selalu hadir dalam kegiatan Dikmaslantas, karena saya masih ada keperluan lain. Saya selaku Kasatlantas memberikan tanggung jawab pelaksanaan tersebut kepada Kanitdikyasa yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan Dikmaslantas tersebut. Saya menerima laporan pelaksanaan kegiatan tersebut agar saya dapat mengawasi kinerja Unitdikyasa. Setiap akhir bulan, akan dilakukan analisa dan evaluasi dengan tujuan mengingatkan kembali mengenai perencanaan sebelumnya, serta dilanjutkan untuk perencanaan kegiatan bulan berikutnya. (Wawancara, 7 Maret 2017)

4.2.1.2 Kemampuan Petugas

Personel yang bertugas memberikan Dikmaslantas adalah seluruh anggota Unitdikyasa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bergiliran melihat kesiapan dari anggota tersebut. Adapun pembagian personel berdasarkan kualifikasi personel Unitdikyasa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Kualifikasi Personel Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	DIKJUR
01	02	03	04	05	06
1	JEMINTEN	IPTU	63090492	KANIT	-
2	MARYANTO	BRIGADIR	88060441	ANGGOTA	-
3	DIANA RAHMAWATI	BRIPDA	96040394	ANGGOTA	-

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Berdasarkan data kualifikasi personel Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dapat diketahui bahwa seluruh personel belum pernah melaksanakan pendidikan kejuaran (Dikjur) tentang fungsi teknis lalu lintas. Pembawaan materi Dikmaslantas diambil oleh Kanitdikyasa. Kanitdikyasa lebih sering berperan dalam penyampaian materi tersebut. Sesuai dengan pernyataan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten (Wawancara, 8 Maret 2017) bahwa, “seluruh personel Dikyasa belum melaksanakan Dikjur, tetapi saya dan anggota saya belajar dengan pengalaman di lapangan dalam kegiatan Dikmaslantas tersebut”.

Kasatlantas menyadari bahwa Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang memiliki kendala pada kualifikasi pendidikan anggotanya. Namun demikian, Kasatlantas tidak menjadikannya sebagai titik lemah dalam melaksanakan tugas kepolisian. Sebagaimana dimaksud oleh Kasatlantas (Wawancara, 7 Maret 2017), “untuk anggota Unitdikyasa, seluruhnya belum melaksanakan Dikjur, tetapi mereka belajar dari lapangan dan pengalaman mereka”.

4.2.2 Analisis Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana dijelaskan

sebelumnya, maka analisis upaya Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar dari segi pelaksanaan dianalisis menggunakan teori manajemen (POAC) dan dari segi kemampuan petugas di analisis menggunakan konsep strategi belajar mengajar dan teori komunikasi.

#### 4.2.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Dikmaslantas Berdasarkan Teori Manajemen (POAC)

Pada pelaksanaan Kegiatan Dikmaslantas, peneliti menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry yang kemudian disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas (Dikmaslantas) sebagai pisau analisis dalam menentukan upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa. Menurut George R. Terry, manajemen terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahap dalam manajemen.

##### a. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry mengatakan bahwa Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Terry, 2009:46)

Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi bukan emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. (Terry, 2009:47)

Kemudian George R Terry membagi Perencanaan menjadi dua yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang berhubungan dengan tujuan dan kemampuan operasional suatu organisasi (Terry, 2009:57). Dihubungkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas (Dikmaslantas) dimana tujuan dari Dikmaslantas untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang undangan dan peraturan lalu lintas. Pada penelitian ini sasaran dari pelaksanaan Dikmaslantas lebih difokuskan kepada pelajar di Kabupaten Magelang dengan materi disesuaikan berdasarkan konsep pelanggaran lalu lintas. Pada pelaksanaan Dikmaslantas kepada pelajar di Kabupaten Magelang, Unitdikyasa mempunyai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam tata cara berkendara yang baik dan benar kepada pelajar di Kabupaten Magelang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang, IPTU Jeminten mengatakan,

Khususnya pada pelajar di Kabupaten Magelang, Unitdikyasa Satlantas

Polres Magelang melaksanakan Dikmaslantas dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelajar di Kabupaten Magelang agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena selain merugikan bagi pelajar tersebut juga merugikan masyarakat pengguna jalan lainnya. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Sedangkan perencanaan taktis adalah perencanaan yang mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing-masing pelaksana, mengalokasikan sumber yang ada, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah tercapai. Dikaitkan dengan Juklak Kapolri No. Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas (Dikmaslantas), dalam pelaksanaan Dikmaslantas, Unitdikyasa memiliki peran untuk menentukan metode, materi, sasaran, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan sarannya.

Berdasarkan teori tentang perencanaan taktis yang dihubungkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Dikmaslantas, peneliti menganalisis bahwa Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang berupaya untuk membuat perencanaan berupa Perencanaan Kegiatan (Rengiat) harian, mingguan, bulanan dan tahunan sebelum melaksanakan kegiatan Dikmaslantas. Dalam Rengiat tersebut terdapat metode, materi, sasaran, waktu, tempat, dan sarannya. Rincian contoh rengiat tersebut dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8  
Rengiat Harian Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang

N O	WAKTU	SASARAN	KEGIATAN / CB	KUAT PERS	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	DUK GAR	HASIL YG INGIN DICAPAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06.00 s/d 07.00 WIB	Pengguna jalan	Public Adress Himbauan lalu lintas	4 pers	SP 3 Bu Sum	KASATL ANTAS	-	Tidak terjadi laka lant. Arus Lalin lancar.	
2.	07.00 s/d 08.00 WIB	Siswa MTs N Borobudur	Pembina upacara	4 pers	MTs N Borobudur	KASATL ANTAS	-	Melaksanakan himbauan lalu lintas kepada siswa MTs N Borobudur	

Sumber: Rengiat Unitdikyasa Satlantas Res Magelang, 6 Februari 2017

Berdasarkan tabel tersebut, sebelum melaksanakan kegiatan Dikmaslantas pada hari Senin, 6 Februari 2017, Unitdikyasa menentukan rencana kegiatan. Dengan Rengiat tersebut, membuktikan bahwa Unitdikyasa dalam pelaksanaan Dikmaslantas dilakukan secara terencana dan terarah. Pada penelitian ini dimaksudkan adanya upaya Dikmaslantas tersebut dalam pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas pelajar.

Selain rengiat, Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Dikmaslantas dalam membuat perencanaan. Hasil Informasi dari Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang, IPTU Jeminten, "Dalam perencanaan kegiatan Dikmaslantas, kami Unitdikyasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Dikmaslantas yang disahkan atau ditandatangani oleh Kasatlantas Polres Magelang" (Wawancara, 8 Maret 2017). Di dalam

SOP Dikmaslantas tersebut disebutkan tiga hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan Dikmaslantas yaitu administrasi, materiil dan logistik serta kemampuan personel Unitdikyasa. Pada administrasi, Unitdikyasa mempersiapkan untuk menentukan daerah sasaran Dikmaslantas, menentukan *strong point*, membuat Springas kegiatan Dikmaslantas dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas. Pada materiil dan logistik, hal yang harus disiapkan adalah perlengkapan perorangan (Juklak, Juknis, dan buku perundang undangan), kendaraan, alat komunikasi, perlengkapan Dikmaslantas, rambu mini, megaphone, kamera handycam, dan anggaran. Pada kemampuan personel yang harus dimiliki yaitu menguasai wilayah tugas, komunikasi verbal, penguasaan hukum dan perundang-undangan, serta penguasaan cara memberikan instruksi (CMI).

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut George R. Terry, Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan atau kegiatan dapat diselesaikan dengan sukses. Tujuan dari pengorganisasian sendiri untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif. Ada empat komponen-komponen pengorganisasian yaitu:

➤ Pekerjaan

Dalam penelitian ini difokuskan kepada Unitdikyasa dimana unit ini terdiri dari Kanitdikyasa dan Banit. Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pada tingkat Polres, Unitdikyasa diampu oleh satu orang Kanit berpangkat IPTU dan empat orang Banit berpangkat bintara. Pada Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang terdiri dari satu Kanitdikyasa dan dua Banit. Informasi ini diperoleh dari Kanit Dikyasa Satlantas Polres Magelang, IPTU Jeminten yang mengatakan bahwa, “Di Unitdikyasa Polres Magelang ini cuma ada saya sebagai Kanit, Pak Maryanto dan Dek Diana sebagai Banit saya” (Wawancara, 8 Maret 2017). Adapun tugas atau pekerjaan dari Unitdikyasa adalah melakukan tindakan pre-emptif, dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar

➤ Pegawai

Setiap orang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Penugasan akan lebih baik apabila disertai perhatian terhadap kepentingan pegawai, setiap pengalaman dan ketrampilan. Penugasan yang diberikan kepada masing-masing individu merupakan bagian tugas-tugas organisasi atau dapat juga tugas dari suatu unit kerja. Pada Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang, Kanitdikyasa berperan dalam pembagian tugas. Dikarenakan jumlah anggota Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang hanya dua, Kanitdikyasa juga ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas. IPTU Jeminten (Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang) berperan sebagai pemberi materi giat Dikmaslantas, Brigadir Maryanto sebagai

pengambilan dokumentasi dalam bentuk video atau foto dan Bripda Diana Rahmawanti berperan membantu IPTU jeminten dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas serta merangkap tugas di bagian administrasi Unitdikyasa. Pada kegiatan Dikmaslantas yang membutuhkan personel lebih, IPTU Jeminten selaku Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang meminta bantuan internal dari Satlantas Polres Magelang khususnya Polwan agar membantu pelaksanaan Dikmaslantas tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang, Iptu Jeminten yang mengatakan,

Biasanya dalam kegiatan Dikmaslantas yang memberikan Materi adalah saya dibantu dek Diana, kemudian pak Maryanto yang mengambil dokumentasi giat. Dek Diana juga berperan di bidang administrasi Unitdikyasa. Kalau kegiatannya membutuhkan personel lebih, biasanya saya minta bantuan polwan dari Satlantas Polres Magelang. (Wawancara, 8 Maret 2017)

➤ Hubungan Kerja

Merupakan hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan dengan pegawai lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya serta hubungan kerja antara anggota dan pimpinan. Keserasian dan kesatuan usaha dalam bekerja akan dapat terbangun dengan baik apabila hubungan tersebut terbina dengan cukup baik. Secara struktur hubungan kerja Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang telah digambarkan dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi Satlantas Polres Magelang merupakan bentuk hubungan kerja yang ada di Satlantas Polres Magelang. Kasatlantas Polres Magelang sebagai pemimpin tertinggi di Satlantas Polres Magelang memiliki hubungan vertikal terhadap seluruh anggota Satlantas Polres Magelang, Kasatlantas memiliki hubungan kerja vertikal kebawah terhadap KBO lantasi yang kemudian KBO lantasi memiliki hubungan kerja vertikal kebawah dengan para Kanit, Kanit memiliki hubungan kerja vertikal ke atas dan kebawah. Untuk kebawah Kanit memiliki hubungan kerja dengan Banit. Pada Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang, Banit Dikyasa memiliki hubungan kerja vertikal keatas dengan Kanitdikyasa yang artinya bahwa Banitdikyasa melaksanakan tugas sesuai dengan komando Kanitdikyasa.

➤ Lingkungan

Komponen pengorganisasian mencakup sarana-sarana fisik dan sarana umum didalam lingkungan tempat pegawai melaksanakan tugas. Komponen lingkungan Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang mencakup ruang Unitdikyasa dalam Satlantas Polres Magelang, anggota Unitdikyasa dan Sarana Prasarana. Sesuai dengan SOP Dikmaslantas Polres Magelang, sarana atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Dikmaslantas adalah seragam polisi sesuai ketentuan, kelengkapan perorangan Satlantas (sabuk lantasi, selempang, pet, peluit, borgol, tanda kewenangan, buku catatan, dan spidol), kendaraan (roda

dua dan roda empat), Alat komunikasi (telepon/hp, HT, dan Megaphone) dan perlengkapan mobil Dikyasa (perangkat pengeras suara, lampu rotator, public adress, kamera, dan P3K). Dalam penelitian ini variabel kedua adalah pelanggaran lalu lintas pelajar sehingga kalangan pelajar di Magelang termasuk dalam komponen lingkungan Unitdikyasa

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Pada pelaksanaan Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang berpedoman pada SOP Dikmaslantas Polres Magelang. Dalam SOP tersebut, Unitdikyasa melaksanakan Dikmaslantas berdasarkan rengiat, rute, jarak, dan waktu tempuh. Terkait dengan variabel kedua yaitu pelanggaran lalu lintas pelajar, upaya kegiatan Dikmaslantas yang dilakukan Unitdikyasa adalah :

➤ Menjadi pembina Upacara di SMA wilayah Magelang

Dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar, Unitdikyasa memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari senin untuk menjadi pembina Upacara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 06.30 wib. Pada kegiatan ini, yang menjadi pembina upacara adalah Kanitdikyasa, sedangkan anggota Unitdikyasa sebagai peserta upacara dan pengambil dokumentasi. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, Unitdikyasa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang menjadi sasaran. Dalam kegiatan ini, Kanitdikyasa selaku pembina upacara menyampaikan materi atau himbauan agar para pelajar yang menjadi sasaran tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Materi atau himbauan tentang pelanggaran lalu lintas yang disampaikan mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembahasan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kanitdikyasa Satlantas Polres Magelang, Iptu Jeminten, mengatakan,

Pada setiap hari senin, Unitdikyasa melaksanakan kegiatan Dikmas dengan menjadi pembina upacara. Yang jadi pembina upacara saya sendiri, kemudian saya menyampaikan materi atau himbauan pada saat amanah pembina upacara tentang tertib berlalu lintas, tujuannya agar menumbuhkan kesadaran para pelajar untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Materi yang saya sampaikan mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk kegiatan ini biasanya saya melakukan koordinasi dulu kepada kepala sekolah agar pihak sekolah juga mengetahui tentang tujuan kami melakukan kegiatan Dikmaslantas tersebut. (Wawancara, 8 Maret 2017).

➤ Penyuluhan

Penyuluhan Dikmaslantas yang dilakukan oleh Unitdikyasa khususnya pada pelajar berupa kunjungan ke tempat pelajar yang menjadi sasaran, kemudian memberikan ceramah yang dilanjutkan

dengan tanya jawab sebagai bentuk penilaian pemahaman terhadap materi ceramah yang telah disampaikan oleh Unitdikyasa. Kegiatan penyuluhan di SMA yang dilakukan Unitdikyasa berdasarkan pada rengiat yang telah dibuat. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, Unitdikyasa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang menjadi sasaran untuk menentukan waktu, tempat, materi, dan peserta penyuluhan.

Pada pelaksanaan kegiatan, materi disampaikan oleh dua orang yaitu Kanitdikyasa dan satu orang Banit. Banit Dikyasa yang lain melakukan pengambilan dokumentasi. Materi yang disampaikan tentang pelanggaran lalu lintas kemudian disampaikan dengan metode tatap muka antara Unitdikyasa dan pelajar di gedung atau ruangan di sekolah yang sudah ditentukan. Sarana dan prasarana yang digunakan berupa proyektor, laptop, speaker, alat peraga, dan materi tentang pelanggaran lalu lintas berupa *slide*.

➤ *Safety Riding*

*Safety riding* adalah kegiatan Dikmaslantas dimana Unitdikyasa memberikan simulasi tentang tatacara berkendara yang baik dan benar. Pada Polres Magelang, Unitdikyasa datang ke sekolah-sekolah dimana sebelum pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan *safety riding*. Kemudian Unitdikyasa berperan untuk memberikan simulasi tentang tata cara berkendara yang baik dan memberikan pengetahuan tentang pelanggaran lalu lintas. Untuk menambah motivasi para pelajar, Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang mengadakan lomba tes praktek kendaraan bermotor roda dua dimana tiga pelajar yang menjadi juara akan diprioritaskan untuk membuat SIM kendaraan roda dua dan tanpa melalui tahap praktek karena sudah diuji pada lomba tersebut. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Kanitdikyasa, IPTU Jeminten:

Kita ada program *safety riding*, kita ke SMA kemudian memberikan simulasi tentang tata cara berkendara yang baik mulai dari memakai helm, memberikan pengetahuan tentang pelanggaran lalu lintas dan kita juga mengadakan lomba dimana juaranya akan mendapat prioritas pembuatan SIM kendaraan roda dua dan tidak perlu mengikuti ujian praktek. Lomba itu bertujuan agar menambah motivasi dari Pelajar agar tetap berkendara dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. (Wawancara, 8 Maret 2017)

➤ *Himbauan melalui operasi simpatik*

Himbauan melalui operasi simpatik di Polres Magelang adalah kegiatan dimana beberapa personel polisi wanita (Polwan) menggunakan selempang, berdiri di tepi jalan di daerah rawan pelanggaran lalu lintas dengan membawa papan bertuliskan himbauan tentang tertib berlalu lintas. Menurut Kasatlantas Polres Magelang, AKP. Didi Dewantoro, S.I.K, S.H. mengatakan,

Di Polres Magelang ini terdapat beberapa tempat titik rawan pelanggaran lalu lintas. Yang pertama daerah Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid. Yang kedua di Jl. Borobudur-Salaman dan kawasan sekitar candi borobudur. Indikator pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut yaitu masih banyak pengendara motor, khususnya pelajar SMA yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), berboncengan lebih dari satu, kendaraan modifikasi yang tidak sesuai dan kendaraan yang tidak dilengkapi kelengkapan standar. (Wawancara, 7 Maret 2017).

Dengan menentukan titik rawan pelanggaran tersebut, kemudian dilakukan kegiatan pemberian himbauan melalui operasi simpatik yang dilakukan oleh Unitdikyasa.

Pada pelaksanaan kegiatan, anggota Unitdikyasa yang berprofesi sebagai Polwan hanya dua orang yaitu Kanitdikyasa, Iptu jeminten dan Banit Dikyasa, Bripda Diana Rahmawanti. Karena kurangnya jumlah anggota, Kanitdikyasa meminta bantuan personel Polwan dari Satuan Lalu Lintas di luar Unitdikyasa. Pada Polres Magelang, pelaksana kegiatan pemberian himbauan melalui operasi simpatik ini disebut Srikandi Zebra. Kegiatan yang dilakukan yaitu pada saat lampu lalu lintas berwarna merah dan kendaraan berhenti, selain menunjukkan papan bertuliskan himbauan tertib berlalu lintas, para Srikandi Zebra menghampiri para pengguna kendaraan bermotor khususnya Pelajar dan memberikan peringatan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu para Srikandi Zebra juga membagikan *leaflet* yang berisi tentang tertib berlalu lintas.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut George R. Terry, pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa dilakukan oleh Kasatlantas Polres Magelang. Pengawasan yang dilakukan berpedoman Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu lintas (Dikmaslantas) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dikmaslantas. Pada Juklak Dikmaslantas disebutkan bahwa pada tahap penilaian terdapat analisa atas pelaksanaan Dikmaslantas, penilaian kekurangan dan keberhasilan kegiatan serta membuat rencana periode pelatihan berikutnya. Mengacu pada hal tersebut, Kasatlantas Polres menetapkan SOP Dikmaslantas Polres Magelang, dimana Kanitdikyasa selaku pelaksana juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan Dikmaslantas. Pertama pada pengawasan, Unitdikyasa melakukan analisa dan evaluasi hasil laporan, mengecek pelaksanaan kegiatan melalui alat komunikasi (telepon/HT), mengontrol langsung di tempat pelaksanaan serta *survey* secara langsung kepada

masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dengan menanyakan respon masyarakat terhadap Dikmaslantas. Kedua, pada pengendalian yaitu melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan pengendalian secara langsung serta tidak langsung. Hasil temuan dilapangan, Kasatlantas Polres Magelang melakukan koordinasi kepada Kanitdikyasa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Dikmaslantas terkait dengan pencegahan pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang. Kanitdikyasa melakukan koreksi dan evaluasi secara langsung terhadap anggotanya dan melakukan pengendalian agar kegiatan Dikmaslantas tetap berjalan dengan lancar. Kanitdikyasa juga melakukan diskusi kepada Pelajar dan menanyakan bagaimana respon Pelajar terhadap kegiatan Dikmaslantas. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Kanitdikyasa, IPTU Jeminten, “setelah kegiatan Dikmaslantas biasanya saya langsung tanya ke beberapa pelajar bahkan guru mereka bagaimana respon mereka terhadap kami dan kebanyakan mereka memberi respon positif terhadap Unitdikyasa.” (Wawancara, 8 Maret 2017)

Tabel 4.9

Analisis Upaya Dikmaslantas dengan Teori Manajemen (POAC)

NO	TEORI MANAJEMEN	TERPENUHI
1	Planning (Perencanaan)	✓
2	Organizing (Pengorganisasian)	✓
3	Actuating (Pelaksanaan)	✓
4	Controlling (Pengawasan dan Pengendalian)	✓

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

#### 4.2.2.2 Kemampuan Petugas Berdasarkan Konsep Strategi Belajar Mengajar

Kegiatan Dikmaslantas dalam hakekatnya dapat berhasil apabila seluruh komponen yang ada didalamnya saling mendukung dan saling terkait. Kemampuan petugas merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan kegiatan Dikmaslantas tersebut. Kemampuan petugas tersebut dapat dikaitkan dengan konsep strategi belajar mengajar. Konsep tersebut dapat menjadi acuan petugas dalam melaksanakan Dikmaslantas tersebut.

Djamarah dan Zain (2014:5) menjelaskan bahwa, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan pendidik dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar.

Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan itu. Di sini terlihat apa yang dijadikan sebagai sasaran dari kegiatan belajar mengajar. Sasaran yang dituju harus jelas dan terarah. Oleh karena itu, tujuan pengajaran yang dirumuskan harus jelas dan konkret, sehingga mudah dipahami oleh anak didik. Bila tidak, maka kegiatan belajar mengajar tidak mempunyai arah dan tujuan yang pasti. Akibat selanjutnya, perubahan yang diharapkan terjadi pada anak didik pun sukar diketahui, karena penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan

belajar mengajar. Karena itu rumusan tujuan yang operasional dalam belajar mengajar mutlak dilakukan oleh guru sebelum melakukan tugasnya di sekolah. (Djamarah dan Zain, 2014:6)

Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dalam melaksanakan kegiatan Dikmaslantas tentunya memiliki suatu tujuan didalamnya. Tujuan dari diadakannya kegiatan Dikmaslantas tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dengan cara melakukan penyuluhan dan berbagai kegiatan lainnya, seperti Polisi Sahabat Anak (PSA), Penerangan Keliling (Penling), dan lain-lain. Kegiatan Dikmaslantas tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar dalam hal berkendara. Pengetahuan pelajar akan tata tertib dan berkendara yang baik dan benar masih terbilang kurang, hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah pelanggaran pelajar selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi. Dikmaslantas tersebut diharapkan dapat mengubah pola berpikir pelajar dalam hal berkendara. Dikmaslantas tersebut memberikan pengetahuan yang berguna untuk pelajar dalam hal berkendara yang baik dan benar, selain itu tindakan atau upaya pre-emptif pihak kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.

Kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup pelajar. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang guru gunakan dalam memecahkan suatu kasus, akan mempengaruhi hasilnya. (Djamarah dan Zain, 2014:6)

Pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Magelang. Sistem pembelajaran di kelas dengan menayangkan slide tidak selalu dilaksanakan. Unitdikyasa sering melaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan melalui kegiatan upacara. Hal tersebut masih belum mampu diterima dengan baik oleh pelajar, karena pelajar hanya dapat berpikir dan menyerap materi penyuluhan tersebut dengan cara menggambarkan atau membayangkan saja, berbeda dengan cara menayangkan dengan slide power point. Power point tersebut akan lebih memudahkan pelajar dalam menyerap materi yang disampaikan. Penyerapan materi tersebut bisa dengan berpikir, melihat, mendengarkan, menggambarkan, dll. Jadi, pelaksanaan Dikmaslantas dalam hal tersebut masih belum dilaksanakan dengan sistem pembelajaran yang baik.

Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam mengajar. (Djamarah dan Zain, 2014:7). Dalam pelaksanaan Dikmaslantas, materi yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur penyampaian materi, contohnya sebelum masuk ke dalam materi, Unitdikyasa memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan dari penyuluhan Dikmaslantas tersebut. Dilihat dari segi metode yang digunakan sudah dapat dimengerti dan dipahami oleh pelajar. Sebagaimana disampaikan oleh Erwin, murid SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Wawancara, 5 Maret 2017), "... lancar bagus dan murid2 pada suka pelaksanaan itu". Dalam segi teknik pelaksanaan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang masih kurang tepat

dan efektif. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya penampilan slide power point, yang dimana lebih memudahkan pelajar dalam menangkap dan memahami materi yang diberikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, dalam point prosedur dan metode yang digunakan Unitdikyasa dalam pelaksanaan Dikmaslantas sudah tepat dan efektif, sedangkan teknik belajar mengajar belum dilaksanakan secara tepat dan efektif.

Keempat, Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria, serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Suatu program baru bisa dikatakan berhasil setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar yang lain. (Djamarah dan Zain, 2014:8)

Unitdikyasa Polres Magelang selalu melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas dan memberikan penilaian terhadap apa yang dialami selama proses pemberian materi. Kriteria standar yang ditentukan oleh Unitdikyasa seperti; (1) tingkat antusias dari pelajar dalam menerima materi, (2) tingkat keaktifan pelajar dalam tanya jawab, dan (3) penilaian dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan Dikmaslantas. Sebagaimana disampaikan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten (Wawancara, 8 Maret 2017), “kalau ketiganya sudah terpenuhi berarti kami mendapatkan respon positif dari pelajar maupun sekolah, dan dapat dikatakan berhasil”. Dalam hal ini Unitdikyasa sudah melakukan tahap menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria, serta standar keberhasilan dengan baik.

Tabel 4.10  
Analisis Kemampuan Petugas Berdasarkan Konsep Strategi Belajar Mengajar

NO	KONSEP STRATEGI BELAJAR MENGAJAR	TERPENUHI
1	Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.	✓
2	Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup pelajar. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran.	-
3	Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif.	-
4	Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria, serta standar keberhasilan.	✓

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

#### 4.3.2.3 Analisis Kemampuan Petugas dengan Teori Komunikasi

Teori komunikasi merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia. Demikian besarnya peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi orang dapat mempengaruhi sikap orang lain dalam

membentuk kerjasama dan mengambil keputusan. Littlejohn dan Foss (2014:5), komunikasi merupakan sebuah proses menyamakan dua atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang. Komunikasi akan terjadi bila ada interaksi yang menghasilkan aksi dan reaksi. Tindakan komunikasi dapat dilakukan secara perorangan maupun melalui medium atau alat perantara tertentu. Komunikasi berasal dari bahasa latin *Communicare*, berarti berpartisipasi dan memberitahukan. Sarwono (1995:86), “komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada sasaran, didalam penyampaian pesan ini komunikasi biasanya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan ini yang sesungguhnya menjadi sasaran komunikasi”.

Dikutip dari buku Daryanto dan Rahardjo (2016:117), Formula Laswell, seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948 mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

a. Siapa (*Who*)

*Who* dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

Unitdikyasa merupakan unsur utama dalam pelaksanaan Dikmaslantas. Pelaksanaan Dikmaslantas dilakukan oleh Unitdikyasa yang dimana, Kanitdikyasa sebagai komunikator dalam penyampaian materi. Selain Unitdikyasa pada pelaksanaan Dikmaslantas seperti *safety riding*, pihak kepolisian dibantu instansi lain, seperti pabrik motor Honda. Jadi, dalam pelaksanaan Dikmaslantas harus saling berkoordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah dan instansi lain. Kerjasama ini yang menjadi komponen dalam mendukung keberhasilan kegiatan Dikmaslantas tersebut. Sebagaimana diampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten (Wawancara, 8 Maret 2017), “...kadang-kadang kita harus menggandeng pihak ketiga agar kegiatan dapat terlaksana...”

b. Berkata Apa (*Says What*)

*Says* menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Pesan merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.

Pemberian materi Dikmaslantas tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Permasalahan yang terjadi umumnya pada pelajar adalah tentang pelanggaran lalu lintas. Banyak pelajar yang melanggar aturan lalu lintas karna kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas dan cara berkendara yang baik dan benar. Jadi, materi yang disampaikan kepada pelajar terfokus pada penyampaian peraturan-peraturan yang berlaku dan bagaimana cara berkendara

yang baik dan benar. Pesan-pesan yang disampaikan berisi pesan kamtibmas, slogan kamtibmas, dll.

c. Melalui Saluran Apa (*In Which Channel*)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik). Penyampaian materi Dikmaslantas dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti; *safety riding*, siaran radio, upacara setiap hari senin disekolah-sekolah, dll. Sebagaimana disampaikan Brigadir Maryanto (Wawancara, 8 maret 2017) “kita hari senin ke sekolah menjadi Irup, selasa ke stasiun radio untuk siaran, rabu kegiatan PSA (Polisi Sahabat Anak), dan seterusnya”.

d. Kepada Siapa (*To Whom*)

Seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, penyandi balik (*decoder*). Pelaksanaan Dikmaslantas ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat terutama pelajar. Hal tersebut dilakukan karena pelajar yang usianya sudah beranjak untuk memperoleh SIM dan dapat berkendara harus dibekali pendidikan berlalu lintas, agar dalam berkendara tidak menimbulkan pelanggaran dan sesuatu yang tidak diinginkan. Selain hal tersebut, pendidikan anak usia dini juga diterapkan agar nantinya pada saat dewasa kelak akan teringat mengenai peraturan lalu lintas.

e. Dengan Efek Apa? (*With What Effect?*)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Tujuan diadakannya Dikmaslantas adalah mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh pelajar dan memberikan pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib atau etika dalam berkendara. Pelajar diharapkan dapat sadar akan pentingnya aturan dan tata cara berkendara yang baik dan benar, agar dalam berkendara tidak menimbulkan bahaya.

Tabel 4.11  
Analisis Kemampuan Petugas Berdasarkan Teori Komunikasi

NO	TEORI KOMUNIKASI	TERPENUHI
1	Siapa ( <i>Who</i> )	✓
2	Berkata Apa ( <i>Says What</i> )	✓
3	Melalui Saluran Apa ( <i>In Which Channel</i> )	✓
4	Kepada Siapa ( <i>To Whom</i> )	✓
5	Dengan Efek Apa? ( <i>With What Effect?</i> )	✓

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

### 4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Dikmaslantas dan Analisis

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang beserta analisisnya.

#### 4.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Dikmaslantas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang adalah sebagai berikut.

##### 4.3.1.1 Faktor yang Menghambat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa adalah sebagai berikut.

###### a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting yang terdapat dalam kegiatan manajemen. Suatu manajemen tersebut digerakkan oleh orang-orang didalamnya. Agar proses kegiatan dapat berlangsung dengan baik, maka perlu orang yang hebat didalamnya. Jadi, faktor sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Indikator keberhasilan suatu kegiatan, salah satunya adalah dari sumber daya manusia yang baik. Unitdikyasa memiliki personel tiga orang, yang terdiri dari; Kanitdikyasa dan dua orang anggota. Dalam segi jumlah, personel Unitdikyasa sangat kurang dan tidak sesuai dengan DSP yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12  
Data Jumlah Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang

NO	UNIT	POLRI		+ / -	PNS		+ / -	JML DSP	JML RIIL	+ / -
		DSP	RIIL		DSP	RIIL				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	KASATLANTAS	1	1	0	0	0	0	1	1	0
2	KAURBINOPSNAL	1	1	0	0	0	0	1	1	0
3	KAURMINTU	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	BAMIN	2	10	8	0	0	0	2	5	3
5	BANUM	0	0	0	2	2	0	2	2	0
6	KANITDIKYASA	1	1	0	0	0	0	1	1	0
7	BANIT	4	2	-2	0	1	1	4	3	-1
8	KANITTURJAWALI	1	1	0	0	0	0	1	1	0
9	BANIT	30	44	14	0	0	0	30	33	3
10	KANITREGIDENT	1	1	0	0	0	0	1	1	0
11	BANIT	8	36	28	0	11	11	8	49	41
12	KANITLAKA	1	1	0	0	0	0	1	1	0
13	BANIT	20	10	-10	0	1	1	20	15	-5
	JUMLAH	71	109		2	15		73	114	

Sumber: Minops Satlantas Polres Magelang, 2017

Dari ketiga personel tersebut, belum satupun yang melaksanakan pendidikan kejuruan (Dikjur). Mereka belajar hanya dari pengalaman selama

bekerja. Ilmu yang didapatkan tentunya kurang maksimal, karena dalam pendidikan kejuruan, ilmu yang membahas di bidangnya lebih dibahas secara rinci dan secara menyeluruh. Dikjur merupakan pendidikan yang penting untuk menunjang tugas seorang polisi. Sebagaimana disampaikan oleh Kasatlantak AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K., mengatakan bahwa:

Dalam pendidikan kepolisian, Dikjur merupakan salah satu pendidikan yang penting untuk menunjang pengetahuan dan kinerja anggota kepolisian, untuk anggota Dikyasa Polres Magelang ini, seluruhnya belum melaksanakan Dikjur, mereka bekerja dari pengalaman saja. Tentunya mereka juga sedang menunggu giliran untuk melaksanakan Dikjur tersebut". (Wawancara, 7 Maret 2017)

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten, bahwa:

Kami semua anggota Unitdikyasa belum melaksanakan pendidikan kejuruan. Kami bekerja dan mencari ilmu dari pengalaman kita dilapangan. Walaupun belum melaksanakan pendidikan kejuruan, kami tetap bekerja dengan profesional. Untuk Dikjur kami masih menunggu giliran, tetapi tidak tahu kapan akan melaksanakan Dikjur tersebut. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Dengan kurangnya kualifikasi yang dimiliki oleh personel Unitdikyasa Satlantak Polres Magelang, maka keterampilan yang dimilikipun belum optimal, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Dikmaslantak yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang membahas tentang kemampuan personel Unitdikyasa. Dari analisis sebelumnya, diketahui bahwa kemampuan personel Unitdikyasa masih belum optimal, yaitu tidak menguasai kemampuan dalam konsep strategi belajar mengajar.

Selain kemampuan petugas dalam melaksanakan Dikmaslantak, kurangnya kreatifitas personel Unitdikyasa juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Dikmaslantak yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan analisis sebelumnya mengenai pelaksanaan Dikmaslantak yang digunakan yaitu terbatas tanpa adanya inovasi-inovasi baru yang digalakkan guna mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar tersebut. Dalam pelaksanaan Dikmaslantak, sasaran kegiatan Dikmaslantak harus ditujukan kepada pelajar, guru, civitas akademika, dan seluruh komponen yang berada di sekolah secara menyeluruh. Hal tersebut diharapkan agar sasaran dapat mematuhi peraturan lalu lintas dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan agar kedepan nantinya, masyarakat khususnya pelajar dapat tertib dalam berlalu lintas.

b. Faktor Anggaran

Anggaran adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Dikmaslantak. Oleh karena itu, kegiatan tidak akan berjalan apabila tidak didukung dengan baik oleh anggaran yang tersedia. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Kalau melihat dari kebutuhan dari rencana anggaran yang ada jelas kurang. Hal tersebut dikarenakan setiap Senin melaksanakan kegiatan

Dikmaslantas ke sekolah. Sedangkan dalam satu tahun berarti ada empat kali dua belas (4X12), sedangkan anggaran kita hanya Rp 3.000.000,-. Anggaran tersebut untuk Dikmaslantas jadi tidak akan tercukupi. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Disisi lain, dukungan anggaran khusus untuk kegiatan Dikmaslantas tidak disediakan oleh dinas. Hal tersebut menjadi kendala sendiri bagi Unitdikyasa dalam melaksanakan Dikmaslantas, sehingga yang dapat dilaksanakan hanya Dikmaslantas dengan skala kecil. Hal tersebut dikarenakan, untuk membuat kegiatan dalam skala besar butuh anggaran yang tidak sedikit. Dengan anggaran yang kecil, merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas.

c. Faktor Waktu dan Tempat

Faktor waktu dan tempat merupakan suatu hal yang penting didalam melaksanakan Dikmaslantas. Pelaksanaan Dikmaslantas yang tepat sasaran harus memperhatikan waktu dan tempat, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal waktu dan tempat, Unitdikyasa masih mengalami kendala yang menjadikan kurang tersampaikan secara menyeluruh terhadap pelajar yang berada di Kabupaten Magelang. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Pelaksanaan Dikmaslantas belum seluruhnya dapat menjangkau kepada pelajar yang berada di Kabupaten Magelang. Hal tersebut dikarenakan, memang banyak sekolah yang berada di Kabupaten Magelang ini. Kami berusaha untuk menjangkau seluruhnya secara bergiliran, tetapi karena kami jumlah personelnnya sedikit dan dukungan anggara yang kurang jadi belum dapat menjangkau keseluruhan. Harapan kami kedepan tetap harus dapat memberikan perhatian dan penyuluhan kepada para pelajar, agar mereka dapat memahami peraturan-peraturan lalu lintas dan berkendara yang baik dan benar. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa tidak mudah untuk melakukan koordinasi dan mengumpulkan masyarakat umum atau masyarakat tidak terorganisir disuatu tempat untuk dilakukan Dikmaslantas, hal tersebut dikarenakan kegiatan masyarakat di tempat yang akan kita lakukan penyuluhan berbeda-beda, sehingga masyarakat masih sibuk dengan kegiatannya dan anggota Dikyasa pun sulit untuk dapat menyamakan waktu yang masyarakat miliki dengan jam dinas yang ada. Hal tersebut sama halnya dengan pelajar yang dimana pelajar masuk ke dalam kelompok terorganisir. Dalam beraktivitas sehari-hari pelajar melaksanakan pendidikan di sekolah, dimana pendidikan tersebut sudah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan sehingga waktu pelaksanaan Dikmaslantas harus disesuaikan dengan kurikulum pendidikan tersebut.

d. Faktor perhatian dan dukungan pelajar maupun sekolah

Terlaksananya Dikmaslantas yang baik, tidak dapat terlepas dari pengaruh perhatian dan dukungan pelajar yang menjadi sasaran kegiatan. Dengan adanya respon positif dari pelajar, Dikmaslantas akan berjalan dengan lebih optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten bahwa:

Tentu yang terpenting adalah perhatian pelajar, apabila pelajar memberikan perhatian penuh dan mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh kami, maka pelajar dapat melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Terkadang ada beberapa pelajar di sejumlah sekolah takut akan kedatangan Polisi. Apabila pelaksanaan Dikmaslantas di ruangan, banyak pelajar yang pada tidak mengikuti Dikmaslantas tersebut, jadi kebanyakan kita menyampaikan materi pada saat upacara hari senin. (wawancara, 8 Maret 2017)

#### 4.3.1.2 Faktor yang Mendukung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendukung kegiatan Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa Polres Magelang adalah kerjasama lintas sektoral. Hal ini tentunya akan memudahkan Kepolisian, khususnya anggota Unitdikyasa dalam melakukan penerapan program kerjanya untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan lalu lintas. Oleh karena itu Polri melakukan kerjasama dengan instansi yang tergabung dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi di dalamnya Dinas Penerangan Umum, Binamarga, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan dan lain-lain, termasuk kerjasama dengan DPRD Kabupaten Magelang yang mengampu pembiayaan tentang segala urusan dalam rangka kegiatan berlalu lintas. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Tabel 4.13  
Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
01	02	03
1	Bupati Magelang	Pembina
2	Kapolres Magelang	Pembina
3	Wakil Bupati Magelang	Wakil Pembina
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Ketua Umum
5	Asisten Ekbang dan Kesra Kabupaten Magelang	Ketua Harian
6	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Sekretaris 1
7	Kasatlantas Polres Magelang	Sekretaris 2
8	Kepala Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang	Anggota
9	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang	Anggota
10	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Magelang	Anggota
11	Kanitdikyasa Polres Magelang	Anggota
12	Kepala Bidang Angkutan pada Dishub Kabupaten Magelang	Anggota
13	Kepala Bidang Pengujian dan Sarana Prasarana pada Dishub Kabupaten Magelang	Anggota

14	Kepala Bina Marga pada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
16	Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	Anggota
17	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Kabupaten Magelang	Anggota
18	Kepala Jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar Magelang	Anggota
19	Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang	Anggota
20	Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Magelang	Anggota
21	Ketua Paguyuban Transportasi Kabupaten Magelang	Anggota

Pada tanggal 03 Februari 2015 juga telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/40/KEP/28/2015. Adapun Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun tugas dari anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Menciptakan dan memelihara kemitraan antar instansi terkait dengan masyarakat;
- Mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
- Meningkatkan komunikasi antar aparat dengan masyarakat;
- Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas aparat;
- Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat;
- Meningkatkan kerjasama dan mendorong terlaksananya berbagai kegiatan untuk menangani masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama;
- Mengevaluasi kegiatan penanganan masalah LLAJ;
- Mendorong adanya perubahan sikap yang positif antar instansi terkait dengan masyarakat;
- Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan masyarakat, agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### 4.3.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Dikmaslantas dengan Manajemen (6M)

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan Dikmaslantas di atas dianalisis dengan menggunakan teori manajemen menurut George Robert Terry (Handoko, 1984:8) dimana untuk mencapai sebuah tujuan terdapat 6 unsur dalam manajemen yang harus terpenuhi. Berikut ini disajikan tabel yang mengkaitkan antara 6 unsur yang terdapat pada teori manajemen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas, berupa faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut.

Tabel 4.14

Analisis Faktor-faktor dengan Teori Manajemen (6M)

6 Unsur	Faktor yang Mendukung	Faktor yang Menghambat
Manusia	Dukungan kerjasama lintas sektoran dan antar fungsi	SDM, Perhatian dan dukungan pelajar dan sekolah
Anggaran	-	Anggaran
Metode	-	SDM
Material	-	SDM, SOP Satlantas Polres Magelang
Sasaran	-	SDM
Peralatan	-	Sarana dan prasarana

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

#### 4.3.2.1 Man (Manusia)

Unsur *Man*/Manusia sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang termasuk dalam unsur *Man*/Manusia adalah dukungan lintas sektoran dan fungsi lain serta faktor penghambat yang termasuk dalam unsur *Man*/Manusia adalah Sumber daya manusia personel Unitdikyasa, dan dukungan/peran pelajar.

Berdasarkan hasil analisis di atas, kualitas Unitdikyasa sebagai pelaksana Dikmaslantas masih terdapat banyak kekurangan sehingga mempengaruhi terhadap tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan Dikmaslantas, walaupun terdapat faktor pendukung didalamnya. Kekurangan yang terdapat pada Unitdikyasa yaitu, kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi seperti yang dijelaskan dalam analisis di atas berdasarkan konsep strategi belajar mengajar yaitu, terdapat pada teknik pelaksanaan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang masih kurang tepat dan efektif. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya penampilan materi melalui slide power point, yang dimana lebih memudahkan pelajar dalam menangkap dan memahami materi yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan dalam *point* prosedur dan metode yang digunakan Unitdikyasa dalam pelaksanaan Dikmaslantas sudah tepat dan efektif, sedangkan teknik belajar mengajar belum dilaksanakan secara tepat dan efektif.

Hal tersebut mempengaruhi proses Dikmaslantas yang dilakukan oleh Unitdikyasa, karena banyak pesan-pesan kamtibmas yang meskipun sudah disampaikan melalui Dikmaslantas namun tidak berhasil diterima dengan maksimal oleh pelajar yang menjadi sasaran kegiatan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pelajar yang menjadi sasaran kegiatan, Erwin, “secara keseluruhan sudah bagus, tetapi kalau hanya lewat arahan pada saat upacara tidak begitu dimengerti.” (Wawancara, 5 Maret 2017). Selain itu personel Unitdikyasa yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan belum ada. Sebagaimana disampaikan oleh Kasatlantas, AKP Didi Dewantoro, S.H., S.I.K., “...seluruh anggota Dikyasa belum melaksanakan pendidikan kejuruan...” (Wawancara, 7 Maret 2017). Unitdikyasa yang ada hanya mengandalkan pengalaman kerja di lapangan dan tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Faktor penghambat lain yaitu,

kurangnya perhatian dan dukungan pelajar maupun sekolah yang menjadi sasaran dalam kegiatan Dikmaslantas. Hal ini dibuktikan pada analisis sebelumnya bahwa, pelajar kurang tertarik pada polisi, banyak yang masih takut kepada polisi, terutama dalam kegiatan Dikmaslantas. Sehingga Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa meskipun diikuti oleh pelajar namun tidak seluruh pelajar antusias dan menerima informasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa, terdapat beberapa faktor pendukung kegiatan yaitu, adanya dukungan dari fungsi lain di Polres Magelang yaitu fungsi Satbinmas. Fungsi Binmas juga memberikan informasi kepada Unitdikyasa mengenai sekolah-sekolah yang menjadi sasaran Dikmaslantas. Dimana sekolah tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Dikmaslantas tersebut. Faktor pendukung lainnya terdapatnya koordinasi lintas sektoral, dimana dalam pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar, dapat dilaksanakan dengan baik.

#### 4.3.2.2 Money (Uang)

Unsur *Money*/uang atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan anggaran Dikmaslantas yang menjadi faktor penghambat. Berdasarkan temuan penelitian di atas, dukungan anggaran Unitdikyasa dinilai belum cukup untuk mendukung pelaksanaan operasional Unitdikyasa. Untuk mendukung pelaksanaan Dikmaslantas yang lebih optimal belum ada anggaran yang mendukung. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dukungan anggaran untuk menyelenggarakan Dikmaslantas. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Kalau melihat dari kebutuhan dari rencana anggaran yang ada jelas kurang. Hal tersebut dikarenakan setiap Senin melaksanakan kegiatan Dikmaslantas ke sekolah. Sedangkan dalam satu tahun berarti ada empat kali dua belas (4X12), sedangkan anggaran kita hanya Rp 3.000.000,-. Anggaran tersebut untuk Dikmaslantas jadi tidak akan tercukupi (Wawancara, 8 Maret 2017)

#### 4.3.2.3 Materials (Bahan-Bahan)

Unsur *Materials*/Bahan-bahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Dikmaslantas, meliputi; sumber daya manusia dan SOP yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan Dikmaslantas. Sumber daya manusia sebagai faktor penghambat dalam hal ini yaitu materi yang seharusnya disampaikan oleh Unitdikyasa kepada pelajar belum optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Erwin, “materi yang disampaikan kurang dapat dipahami karena hanya diberikan lewat arahan pada saat upacara saja.” Disisi lain, terdapat faktor penghambat lainnya dalam unsur Material ini, yaitu faktor Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Dikmaslantas. Di dalam SOP tersebut, sudah dijelaskan dengan singkat dan mudah perincian untuk dapat dipahami, sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan Dikmaslantas meskipun tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

#### 4.3.2.4 *Methods* (Metode)

Unsur *methods*/metode dalam analisis ini yaitu faktor sumber daya manusia. Metode dalam penelitian ini adalah cara pelaksanaan *Dikmaslantas* yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa *Dikmaslantas* yang dilakukan oleh Unitdikyasa hanya dengan cara konvensional ataupun hanya dilakukan pada saat upacara hari Senin, materi jarang disampaikan melalui paparan *powerpoint*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Pelaksanaan kegiatan *Dikmaslantas* memang sering kita laksanakan dalam upacara hari senin di sekolah-sekolah. Kita sering menjadi Irup pada saat upacara, disitulah kami berikan *Dikmaslantas* dalam pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas. Memang terkadang kita juga sampaikan di dalam ruangan, tetapi lebih sering kita sampaikan pada saat upacara. (Wawancara, 8 Maret 2017)

*Dikmaslantas* yang dilakukan masih menggunakan cara-cara yang konvensional dan belum ada inovasi-inovasi ataupun terobosan dalam memberikan pesan-pesan lalu lintas kepada pelajar. Dengan perkembangan teknologi di zaman modern ini, tentunya Unitdikyasa dalam memberikan *Dikmaslantas* juga dapat berinovasi dengan teknologi dan sosial media yang ada pada saat ini.

#### 4.3.2.5 *Markets* (Pasar)

Unsur *Markets*/Pasar dalam faktor penghambat kegiatan *Dikmaslantas* adalah faktor sumber daya manusia yaitu, sasaran kegiatan *Dikmaslantas* yang dilakukan oleh Unitdikyasa. *Markets* adalah sebagai pasar atau sasaran, setelah memiliki beberapa unsur di atas, manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri. Sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelajar yang rawan akan melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satu aspek keberhasilan *Dikmaslantas* tersebut ditinjau dari aspek *markets* itu sendiri. Pelajar yang menjadi sasaran harus mendukung dari pelaksanaan *Dikmaslantas* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, para pelajar belum sepenuhnya mendukung kegiatan *Dikmaslantas* tersebut. Ada beberapa pelajar yang tidak mau mengikuti kegiatan *Dikmaslantas* tersebut, ada yang mengikuti tetapi dengan sikap acuh. Hal tersebut menjadikan tujuan dari pelaksanaan *Dikmaslantas* menjadi tidak optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten bahwa:

Tentu yang terpenting adalah perhatian pelajar, apabila pelajar memberikan perhatian penuh dan mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh kami, maka pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Terkadang ada beberapa pelajar di sejumlah sekolah takut akan kedatangan Polisi. Apabila pelaksanaan *Dikmaslantas* di ruangan, banyak pelajar yang pada tidak mengikuti *Dikmaslantas* tersebut, jadi kebanyakan kita menyampaikan materi pada saat upacara hari senin. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Magelang, maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah karena kurangnya pengetahuan pelajar terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Ditambah lagi kesadaran dari pelajar yang kurang. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua pelajar maupun pihak sekolah, sehingga menjadi tidak efektif jika materi penyuluhan Dikmaslantas hanya ditujukan pada pelajar saja. Sasaran Dikmaslantas dapat dilaksanakan secara efektif jika langsung ditujukan langsung kepada seluruh komponen yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

#### 4.3.2.6 *Machines* (Mesin)

Unsur *Machines*/Mesin dalam pembahasan ini adalah faktor sarana-prasarana sebagai faktor penghambat. *Machines* (Mesin) diartikan sebagai sarana dan prasarana (Sarpras). Sarpras adalah salah satu unsur pendukung dari sebuah manajemen. Dalam penelitian ini *Machines* (Mesin) yang dimaksud adalah sarana ataupun peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa. Berdasarkan hasil observasi Dikmaslantas yang dilaksanakan di Pondok pesantren Borobudur, sarana yang digunakan hanya proyektor dan laptop. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana yang digunakan oleh Unitdikyasa masih sangat terbatas. Berdasarkan temuan di atas maka dapat diketahui bahwa sarana ataupun peralatan untuk menunjang pelaksanaan Dikmaslantas oleh Unitdikyasa masih perlu penambahan.

Tabel 4.15

Sarana dan Prasarana Unitdikyasa

##### a) Ranmor Dinas

NO	JENIS	MERK	NOPOL	KONDISI
1	KBM R4	DAIHATSU LUXIO	1660-55	BAIK
2	KBM R2	YAMAHA SCORPIO	1630-55	RUSAK RINGAN

##### b) Alut / Asus

NO	JENIS					KET
	SENER	ROMP I	JAS HUJAN	KOMPUTER	MEGAPHONE	
1	1 Buah	2 Buah	2 Buah	1 Buah	1 Buah	

Sumber: Minops Unitdikyasa, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Unitdikyasa masih belum mencukupi. Sebagaimana disampaikan oleh Kanitdikyasa, Iptu Jeminten:

Untuk material dan logistik yang ada di Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih perlu diadakan penambahan barang inventaris guna menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. (wawancara, 8 Maret 2017)

# PENUTUP

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap optimalisasi Dikmaslantas oleh Unitdikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magelang dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar

Pelanggaran lalu lintas pelajar di Kabupaten Magelang tergolong tinggi karena disebabkan kurang tegasnya hukum dan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas tersebut, mentalitas dan perilaku oknum anggota Polri yang kurang baik dalam menegakkan aturannya sendiri menjadi tolak ukur pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas, kualifikasi kemampuan dan ketrampilan personil Satlantas yang kurang memadai dimana dari 114 personil hanya 18 personil yang sudah mendapatkan Dikjur Lantas, sarana dan prasara yang sudah tidak layak digunakan sehingga menyebabkan pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas, kurangnya kesadaran dari pelajar sendiri akan peraturan lalu lintas dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan pelajar lalai dan melakukan pelanggaran lalu lintas dan terakhir yaitu peran orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan pribadi saat ke sekolah dimana anak belum memiliki SIM yang kemudian menjadi kebiasaan dan budaya mengendarai kendaraan bermotor tidak menggunakan SIM.

2. Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa

a. Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar di Polres Magelang belum optimal karena jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Magelang pada tahun 2014 sampai 2016 masih tergolong tinggi. Pada pelaksanaan kegiatan Dikmaslantas, sudah sesuai dengan *job description* Unitdikyasa yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar tentang lalu lintas yang dalam hal ini adalah menjadi pembina upacara yang menyampaikan amanat dan himbuan agar pelajar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan memberikan materi tentang pelanggaran lalu lintas melalui *slide*, memberikan simulasi tentang *safety riding*, dan pemberian himbuan melalui Srikandi Zebra.

b. Kualifikasi kemampuan personel Unitdikyasa yang dianalisis dengan Konsep Strategi Belajar Mengajar yang terdiri dari empat strategi dasar dalam belajar mengajar yaitu, Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup

siswa, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam mengajar, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Berdasarkan analisis melalui keempat strategi dasar tersebut, dapat dinyatakan bahwa kemampuan personel Unitdikyasa di Polres Magelang belum optimal karena pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup siswa belum terpenuhi dan dari segi teknik pelaksanaan Dikmaslantas tidak efektif. Analisis kemampuan petugas dengan menggunakan teori Komunikasi, dalam teori ini terdapat lima hukum retorika yang wajib dipenuhi, yaitu; (1) Siapa (*Who*), (2) Berkata Apa (*Says What*), (3) Melalui Saluran Apa (*In Which Channel*), (4) Kepada Siapa (*To Whom*), dan (5) Dengan Efek Apa? (*With What Effect?*). Berdasarkan analisis melalui kelima aspek dalam teori komunikasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kemampuan personel Unitdikyasa belum optimal, karena seluruh personel Unitdikyasa tidak memiliki kualifikasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Dikmaslantas

Kegiatan Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa Polres Magelang dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan 6 unsur manajemen. Unsur *Man/Manusia* memiliki faktor pendukung berupa dukungan fungsi dan instansi lain, namun juga memiliki faktor penghambat berupa kemampuan anggota yang belum memiliki sertifikat pelatihan pendidikan kejuruan (*Dikjur*) dan perhatian serta dukungan siswa dan sekolah. Unsur berikutnya adalah *Money/Anggaran* yang termasuk dalam faktor penghambat. Unsur *Method/Metode* yang digunakan termasuk dalam faktor penghambat. Unsur *Materials/Materi* memiliki faktor penghambat berupa SOP yang tidak menjelaskan secara rinci berkaitan dengan Dikmaslantas. Unsur *Market/Sasaran* masuk dalam faktor penghambat karena belum seluruhnya terpenuhi. Unsur yang terakhir adalah unsur *Machines/Sarana Prasarana* menjadi faktor penghambat karena keterbatasan sarana prasarana dalam melaksanakan Dikmaslantas.

## 5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Dikmaslantas yang dilaksanakan oleh Unitdikyasa Polres Magelang dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas belum optimal. Maka dari itu, diajukan saran sebagai berikut:

1. Saran terhadap Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar

Tingginya pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar, disarankan agar sanksi bagi pelanggar tersebut lebih dipertegas. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentunya anggota Kepolisian juga harus menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Kepolisian sebagai penegak hukum yang dimana juga sebagai panutan masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan. Kepada pimpinan agar menindak tegas sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku terhadap anggota yang melanggar. Hal tersebut agar menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Kepolisian tidak sewenang-wenang terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu peran orang tua sangat penting untuk mengingatkan kepada anak akan hal atau perilaku yang baik, bukan sebaliknya. Jadi untuk orang tua agar dapat membimbing anaknya dengan baik.

2. Saran terhadap Upaya Dikmaslantas oleh Unitdikyasa
  - a. Dalam pelaksanaan Dikmaslantas diperlukan inovasi-inovasi, seperti contohnya; pemberian game dalam tata tertib berlalu lintas, yang dimana pemenangnya diberikan reward dari pihak Kepolisian. Penggunaan media sosial dalam memberikan himbauan-himbauan berlalu lintas melalui instagram, whatsapp, facebook, dll. Membuat game online berbasis pendidikan tentang peraturan dan tata tertib dalam berkendara, yang mana game tersebut dapat di download dan dimainkan oleh pelajar di Kabupaten Magelang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
  - b. Dalam penyampaian materi oleh Unitdikyasa harus dapat tersampaikan dengan baik kepada pelajar. Hal tersebut merupakan indikator keberhasilan penyuluh. Kemampuan petugas harus selalu di tambah, salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Anggota agar selalu diberi tambahan wawasan dan mencari teknik yang tepat dalam membuat suasana Dikmaslantas menjadi kondusif seperti yang diharapkan, serta mengikuti pelatihan-pelatihan seperti contohnya pendidikan kejuruan (Dikjur).
3. Saran Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dikmaslantas
  - a. Jumlah personel Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang tidak memenuhi DSP, hal tersebut berakibat kepada terkendalanya kemampuan Unitdikyasa dalam pelaksanaan tugas Dikmaslantas. Maka, penulis mengajukan saran kepada Kapolres Magelang kiranya dapat menambah jumlah personel Unitdikyasa Satlantas sesuai dengan DSP yang ada guna meningkatkan kinerja Unitdikyasa dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar, serta menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan jejaring kepangkatan.
  - b. Adanya pemenuhan sarana dan prasarana untuk Unitdikyasa Satlantas Polres Magelang dalam menunjang kegiatan Dikmaslantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas pelajar.

- c. Adanya penambahan anggaran guna tercukupinya kebutuhan Unitdikyasa dalam melaksanakan Dikmaslantas pada pelajar. Dikmaslantas tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya dukungan anggaran dalam kegiatan Dikmaslantas. Tidak tercukupinya anggaran membuat Dikmaslantas belum dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Akademi Kepolisian. 2013. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Akpol.

Akademi Kepolisian. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/157/ XII/ 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian.

Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Creswell, John W. 2014. *Reasearch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daryanto dan Muljo Rahardjo. 2016. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2014. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Djamin, Awaloedin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian*. Jakarta: YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian).

Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Ihromi, T.O. 2013. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ismatullah, Dedi. 2012. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: CV Pustaka Setia

Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Littlejohn, S. W. dan Foss, Karen A. 2014. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Mulyana, Deddy. 2009. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, cet 14, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, S. Wirawan. 1996. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## UNDANG-UNDANG

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/05/V/2003 Tanggal 29 Mei 2003 Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta: Gradien Mediatama
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Surabaya: Kesindo Utama

## JURNAL

Sadono, Soni. 2016. "budaya tertib berlalu-lintas 'kajian fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di kota bandung' " volume 4, nomor 1. Hal 61-79.

## SKRIPSI

Ferdiansyah. 2013. Peran Sat Lantas Dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang, Semarang: STIK-PTIK.

Kusuma, David Adhi. 2013. Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menekan Jumlah Kecelakaan Di Wilayah Hukum Polres Pandeglang, Semarang: STIK-PTIK.

Wiratama, Dika Hadiyan Widya. 2013. Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Smp Di Polres Lamongan, Semarang: STIK-PTIK.

## INTERNET

KabarMagelang, "Operasi Simpatik 2016 Ribuan Pelanggar Lalin Mayoritas Pelajar" dalam <http://www.kabarmagelang.com/2016/03/operasi-simpatik-2016-ribuan-pelanggar.html>, 22 Maret 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, 6 Februari 2017.